

**STRATEGI 'MALALA FUND' DALAM MEMPERJUANGKAN HAK
PENDIDIKAN PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2013-2015**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NADYA SRI AISYAH AMANNIE

20323025

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2024

STRATEGI 'MALALA FUND' DALAM MEMPERJUANGKAN HAK

PENDIDIKAN PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2013-2015

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NADYA SRI AISYAH AMANNIE

20323025

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI 'MALALA FUND' DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2013-2015

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Sebagian syarat-syarat dalam memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 Juni 2024

Mengesahkan Program Studi

Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
2. Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.
3. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
4. Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 Juni 2024



Nadya Sri Aisyah Amannie

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Tertulisnya karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Papah dan Mamah

Terima kasih atas doa dan ridha yang selalu dilantunkan untuk setiap urusan baik dimasa kuliah maupun di saat pengerjaan skripsi ini. Mereka selalu ada untuk memberikan nasihat, semangat dan kekuatan yang tiada habisnya. Saya merasa bersyukur dan bangga bisa menjadi anak papah dan mamah.

Saudara dan Keluarga Tersayang

Terima kasih atas dukungan dan nasihat yang selalu diberikan untuk bisa menjadi anak yang mandiri, berjuang untuk menjadi anak yang berhasil, dan selalu kuat untuk menjalani setiap jalan yang ditempuh.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2020

Terima kasih telah menjadi pelengkap di setiap perjalanan pembelajaran semasa di HI UII, dan memberikan banyak pengetahuan dan pengenalan berharga pada semasa perkuliahan.

HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang Siapa Bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil”

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْخَدِّ

“Tuntutlah Ilmu Sejak dari Buaian hingga Liang Kubur”

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

“Kesabaran itu Membantu Segala Pekerjaan”

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا شَمَرٍ

“Ilmu Tanpa Amal Bagai Pohon Tak Berbuah”

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَا فَلَإِنَّدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكَسَلُ

“Bersungguh-sungguhlah dan Jangan Bermalas-malasan dan Jangan Pula Lengah karena Penyesalan Akibat itu Bagi Orang yang Bermalas-malasan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamiin

Segala puji bagi Allah SWT sebagai tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmar dan kasih sayang saya dapat diberikan kemudahan, Kesehatan, kelancaran dan kesempatan hingga di titik saya dapat menyelesaikan karya sederhana ini, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada bagian Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga di yaumul akhir nanti.

Saya sebagai penulis menyadari dalam setiap perjalannya saya menyelesaikan tulisan ini memiliki hambatan dan kekurangan, namun banyaknya dukungan, bimbingan dan bantuan yang saya miliki selama mengerjakan tulisan ini banyak membawa manfaat bagi saya. Karena itu, saya sebagai penulis meminta kesempatan untuk diperkenankan mengucapkan rasa terima kasih yang tiada habisnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran saya dalam menyelesaikan penulisan ini:

1. Allah SWT yang tiada henti memberikan nikmat dan ridha Kesehatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki.
2. Kedua orang tua saya, Papah dan Mamah yang sangat saya cintai. Terima kasih untuk dukungan doanya baik dalam segi materi maupun moril dan selalu memprioritaskan kebahagiaan anaknya. Dan terima kasih telah mengizinkan saya sebagai anak perempuan satu-satunya dari dua bersaudara untuk menimba ilmu menjadi anak perantauan yang jauh dari rumah dan kasih sayang yang selalu kalian berikan. Semoga papah dan mamah selalu diberikan kesehatan agar dapat selalu diberikan kesabaran selama mendampingi proses di dalam

hidup saya. Dan semoga Allah selalu memberikan kelapangan rezeki dan kesabaran di masa-masa yang akan datang.

3. Kakak saya, Muhammad Shafiq Ali Al-Mousserji, dia menjadi kaka saya yang sangat memperhatikan saya sebagai adiknya dan menjadi panutan saya untuk menjadi adik yang lebih baik. Terima kasih banyak.
4. Adik Sepupu saya, Sarah Ayu Khoirunnisa dan Dheby Alfiana Shakib, terima kasih banyak telah menemani saya selama penulisan skripsi di rumah. Selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar Bin Samirun, terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan, keluhan dan curahan hati saya yang selalu diberikan saran dan jalan untuk bisa menghadapi suatu masalah.
6. Bapak Fathul Wahid ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.PSI., M.SI., Psikolog. Selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
8. Miss Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. Selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas dukungan dan arahan yang diberikan.
10. Miss Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A. dan Miss Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas bimbingan, saran, waktu, motivasi dan kesabaran yang miss Alfredha berikan kepada saya selama proses penulisan skripsi saya. Saya memohon maaf apabila selama proses bimbingan terdapat banyak kesalahan kata maupun sikap saya, semoga miss Alfredha selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki serta rahmat oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	16
1.9 Sistematika Pembahasan	16

BAB 2 PERMASALAHAN KESENJANGAN DAN LEMAHNYA PENDIDIKAN PEREMPUAN SERTA KEMUNCULAN ORGANISASI MALALA FUND DALAM MENYUARAKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN.....	18
2.1 Kesenjangan Pendidikan Perempuan di Pakistan	19
2.1.1 Keterbatasan Hak Pendidikan Perempuan pada Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Pakistan	23
2.1.2 Kualitas pendidikan bagi perempuan di Sektor Swasta dan Negeri	27
2.2 Faktor Pendukung yang Memengaruhi Lemahnya Hak Pendidikan Perempuan di Pakistan	29
2.2.1 Faktor Budaya dan Sosial.....	30
2.2.2 Faktor Ekonomi dan Kemiskinan.....	32
2.3 Kemunculan Organisasi Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan bagi Perempuan di Pakistan	33
BAB 3 STRATEGI MALALA FUND DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2013-2015	38
3.1 Strategi Malala Fund dalam Membantu Penyampaian Layanan.....	38
3.1.1 Upaya Layanan Kerjasama Malala Fund dalam Memperkuat Pendidikan bagi Perempuan di Pakistan	40
3.2 Strategi Malala Fund sebagai Penyedia Pendidikan	48
3.2.1 Peran Malala Fund dalam Menyediakan Pendidikan bagi Perempuan di ...	49
3.2.2 Malala Fund Memberdayakan Pendidikan Perempuan di Pakistan melalui Dukungan Finansial	50
3.2.3 Peran Malala Fund dalam mendukung Program melalui Education Champion Network	53
3.3. Strategi Malala Fund dalam Memberikan Advokasi Kebijakan Publik	56
3.3.1 Malala Fund dalam Menyuarakan Pendidikan Perempuan di Pakistan	57
3.3.2 Upaya Pemerintah Pakistan dalam Membantu Malala Fund untuk	62
BAB 4 PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Temuan Penelitian dalam Penerapan Teori Strategi Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Pakistan Tahun 2013-2015 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Anak putus sekolah berdasarkan provinsi dan jenis kelamin	21
Gambar 2.1.1 Angka Melek Huruf di beberapa Daerah Provinsi khususnya di wilayah pedesaan	24
Gambar 2.2.1 Tingkat sosial menjadi permasalahan utama pada pendidikan tinggi perempuan	30
Gambar 3.1 Kolaborasi Pemerintah untuk Program Hak Anak Perempuan Atas Pendidikan di Pakistan	44
Gambar 3.2.1 Aktivistis Gulmakai Network Zehra Arshad	55
Gambar 3.3.1 Pidato Malala Fund di PBB	57
Gambar 3.3. 2 Gerakan Kampanye #GirlsCount	59
Gambar 3.3.3 Akun Resmi Twitter Instagram dan Tiktok Malala Fund	61
Gambar 3.3.4 Peresmian Komitmen Jangka Panjang Malala Fund terhadap Anak Perempuan di Pakistan	64

DAFTAR SINGKATAN

CSOs	: Civil Society Organizations
FATA	: Federally Administered Tribal Areas
GWI	: Girl Women's Institute
ICT	: Information and Communication Technologies
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KPK	: Khyber Pakhtunkhwa
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCE	: Personal Consumption Expenditures
PDB	: Produk Domestik Bruto
RUU	: Rancangan Undang-Undang
STEAM	: Sains, Teknologi, Teknik, Seni dan Matematika
UNDP	: United Nations Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UN Women	: United Nations Women

ABSTRAK

Hak Pendidikan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana hak pendidikan menjadi hak yang wajib untuk kebutuhan individu dalam mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan. Hak pendidikan perempuan di Pakistan telah menjadi isu penting karena berbagai hambatan sosial-ekonomi dan budaya. Secara bersamaan, sejak tahun 2013-15 terbentuknya Malala Fund dan menjadi organisasi NGO (*Non-Governmental Organization*) yang membawa peningkatan kualitas pendidikan seperti melakukan kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan non-pemerintah, mengumpulkan dan untuk pengembangan fasilitas pendidikan dan aktif pada kampanye. Malala Fund menjadi suara utama untuk pendidikan perempuan di Pakistan untuk dapat menjadi pengaruh perubahan legislasi dan peningkatan investasi dalam pendidikan perempuan. Terdapat strategi Malala Fund yang dijelaskan oleh Stromquist yang sesuai dengan peran Malala Fund sebagai organisasi *NGO* dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Pakistan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya: membantu penyampaian layanan, sebagai penyedia pendidikan dan mengadvokasi kebijakan publik

Kata kunci: Malala Fund, NGO, Pakistan, Hak Pendidikan, Perempuan, Hak Asasi Manusia

The right to education for women is part of human rights, where the right to education is a right that is mandatory for individual needs in achieving the desired level of education. Women's educational rights in Pakistan have become an important issue due to various socio-economic and cultural barriers. Simultaneously, since 2013-15 the Malala Fund was formed and became an NGO (Non-Governmental Organization) which brought about improvements in the quality of education such as collaborating with both the government and non-government, collecting and developing educational facilities and being active in campaigns. The Malala Fund is a leading voice for women's education in Pakistan to influence legislative change and increased investment in women's education. There is a Malala Fund strategy explained by Stromquist which is in accordance with the Malala Fund's role as an NGO organization in encouraging women's empowerment in Pakistan in community development, including: helping to deliver services, as an education provider and advocating for public policy

Keywords: Malala Fund, NGO, Pakistan, Education Rights, Women, Human Right

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi sebuah hak dasar bagi setiap individu, tanpa disadari di seluruh belahan dunia termasuk. Pakistan banyak perempuan mulai kehilangan hak dasar mereka di bidang pendidikan. Laporan Statistik Pendidikan Pakistan tahun 2013-2014 menunjukkan adanya ketimpangan angka melek huruf pada laki-laki dan perempuan di beberapa provinsi di Pakistan diantaranya pada provinsi Balochistan dengan persentase laki-laki sebesar 70,8% yang berbanding jauh dengan perempuan sebesar 33,3%. Kondisi ini juga turut dialami oleh provinsi Khyber Pakhtunkhwa dengan persentase angka melek huruf laki-laki berjumlah 84,3% dan perempuan 50,5% (Pakistan Education Statistics Report 2013-2014). Dari kesenjangan ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan baik dalam norma budaya, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kemiskinan. Pendidikan perempuan menjadi isu politik yang masih terus terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Banyak perempuan Pakistan yang mengkhawatirkan mengenai keterlambatan dalam pengembangan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Kondisi pendidikan perempuan Pakistan menjadi penting untuk dilihat karena peningkatan permasalahan yang terus menerus terjadi (Fazal and Ghazi 2018).

Pakistan memiliki perbedaan gender yang substansial dalam pendidikan. Pakistan yang dikenal sebagai masyarakat patriarkal dimana perempuan banyak mendapat tindakan diskriminasi yang mengarah pada status sosial, ekonomi, dan politik yang rendah. Pendidikan tidak memungkinkan bagi perempuan untuk memasuki angkatan kerja di Pakistan, karena stigma tradisional dan kebiasaan budaya. Pakistan mempunyai masalah pendidikan bagi anak perempuan karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kekerasan gender, kualitas pendidikan, dan pernikahan dini.

Permasalahan pendidikan yang terjadi di Pakistan masih menjadi salah satu konflik internal, yang diakibatkan kurangnya pendidik perempuan, akses layanan pendidikan, maupun ketidaktepatan dalam mengelola program pendidikan khususnya terjadi pada wilayah yang jauh dari pusat kota atau desa yang sulit mendapatkan hak pendidikan (Kamal and Khan 2022). Dilansir dari East Asia Forum, bukti sejarah Asia Selatan menunjukkan bahwa ketatnya pengasingan perempuan tidak dapat berubah. Institusi sosial seperti *Purdah*. Seperangkat praktik yang memaksakan pemisahan gender di ruang publik dan pengasingan perempuan. *Purdah* membatasi kemampuan perempuan untuk bekerja di luar rumah atau di tempat terdekat, yang membatasi partisipasi tenaga kerja dan mobilitas pekerjaan mereka. Wanita Pakistan dipekerjakan secara tidak proporsional dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah di pertanian pedesaan. Mereka secara sistematis dibayar rendah dibandingkan laki-laki, memiliki keamanan kerja yang lebih rendah dan hampir tidak memiliki kemandirian finansial (East Asia Forum 2018). Faktor-faktor tersebut hingga saat ini masih terus

berlangsung sehingga mendorong para perempuan di Pakistan kesulitan untuk mengakses hak mereka di bidang pendidikan.

Menurut KTT Oslo mengenai pendidikan dan pembangunan, Pakistan dilihat menjadi negara dengan kinerja buruk di dunia pendidikan. Banyak anak yang putus sekolah khususnya di beberapa daerah terpencil seperti pada provinsi Balochistan dengan persentase perempuan berpendidikan rendah di tahun 2014-2015, 81% perempuan tidak dapat menyelesaikan sekolah dasar dibandingkan dengan 52% laki-laki (Human Rights Watch 2018).

Dengan adanya kondisi ini, mendorong salah seorang anak muda di Pakistan mendirikan sebuah organisasi yang membantu perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan mereka. Organisasi ini dikenal sebagai organisasi Malala Fund, yang menjadi salah satu organisasi dalam menyuarakan hak pendidikan perempuan yang disoroti oleh masyarakat Global. Organisasi tersebut juga tergolong sebagai organisasi *Non-Government Organization* (NGO) di Pakistan. Malala Fund dikenal memiliki jaringan *education champion* dalam mempermudah jangkauannya pada tingkat lokal. Malala Fund sendiri percaya bahwa dengan didirikannya Organisasi Malala Fund ini dapat menjadi perubahan yang nyata untuk perempuan dan anak-anak dalam mendapatkan hak pendidikan mereka di tingkat lokal. Tidak hanya di Pakistan, Malala Fund juga berfokus pada negara-negara berkembang terutama pada negara dengan tingkat pendidikan yang rendah (“Malala's Story | Malala Fund”).

Organisasi Malala Fund didirikan oleh Malala Yousafzai, salah seorang perempuan di Pakistan yang dibantu oleh ayahnya setelah ia mendapat ketidakadilan

dalam menempuh pendidikannya di Pakistan. Malala Fund mulai aktif di tahun 2013 tepatnya setelah tragedi ketidakadilan yang menimpanya di tahun 2012 (Mahr 2012). Ketidakadilan yang terjadi kepada Malala ini dilakukan oleh para kelompok Taliban, dimana mereka menembak Malala karena keaktifannya dalam menyuarakan hak pendidikan di Pakistan. Serangan terhadap seorang anak perempuan yang menjadi terkenal setelah berkampanye menentang upaya Taliban yang melarang anak perempuan bersekolah dengan kekerasan menuai kecaman global. Meskipun mengalami cedera kepala yang serius, Malala selamat berkat perawatan darurat di fasilitas militer Pakistan dan operasi serta rehabilitasi selanjutnya di Rumah Sakit Queen Elizabeth di Birmingham. Kehidupan Malala yang tinggal dibawah kendali Taliban bukanlah suatu hal yang mudah baginya, untuk menjadi wanita mandiri Malala berusaha secara keras menghadapi sekelompok Taliban Pakistan yang melarang wanita untuk pergi sekolah serta melakukan aktivitas lainnya di sekolah (Boone 2014).

Malala Fund telah membentuk program diantaranya *Education Champion Network* dan program perempuan yang didalamnya mendukung aktivis muda dalam memperkuat suara dan menciptakan dunia bagi anak perempuan agar memiliki hak untuk mengatasi hambatan yang menghalangi impian mereka. Tindakan sosial lainnya yang bisa Malala Fund lakukan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pendidikan perempuan yakni dengan cara memberikan ruang kepada perempuan agar bisa bersekolah pada tingkat menengah di Pakistan. Malala berusaha memberikan yang terbaik kepada para anak-anak atau perempuan agar dapat mengikuti pendidikan di kelas sebagaimana mestinya, Malala juga turut membantu untuk memenuhi kebutuhan

sekolah seperti menyediakan seragam, buku, memperbaiki kelas dan berbagai perlengkapan sekolah yang dibutuhkan oleh para siswa sekolah (Iswara 2020).

Perlu disadari bahwa kini peran pendidikan merupakan suatu hal yang dapat membawa perubahan sosial bagi setiap individu, dengan kata lain apabila memiliki pendidikan yang tinggi akan memengaruhi pola kehidupan sosial yang baik. Kondisi inilah yang dirasakan oleh perempuan Pakistan yang mana perempuan berpendidikan lebih cenderung dipandang dan didengarkan. Akan tetapi budaya patriarki yang melekat membuat perempuan kesulitan untuk berkontribusi dalam aspek kehidupan mereka (Weiss 2003). Saat ini perempuan di Pakistan memiliki celah yang cukup kecil dalam memperoleh hak kebebasan pendidikan, bahkan peran kebijakan pemerintah tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam menyuarkan hak pendidikan perempuan di Pakistan. Hal ini akhirnya berimbas pada penurunan tingkat kesadaran perempuan dalam memperjuangkan hak mereka agar menjadi perempuan yang berpendidikan (Samina & Kathy 2011).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui beberapa strategi yang dilakukan oleh Malala Fund dalam menyuarkan hak pendidikan perempuan di Pakistan tahun 2013-2015 dengan menggunakan konsep mengenal pemberdayaan *NGOs* dalam paradigma baru bagi masyarakat sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Malala Fund dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan tahun 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengetahui bentuk strategi yang dilakukan oleh Organisasi Malala Fund dalam memperjuangkan hak pendidikan di Pakistan di tahun 2013-2015 serta menggunakan konsep mengenal pemberdayaan *NGO* dalam paradigma baru bagi masyarakat sipil.

1.4 Cakupan Penelitian

Pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan yang dilakukan *NGO* pada paradigma baru bagi masyarakat sipil pada permasalahan kesenjangan di bidang pendidikan yang dialami oleh perempuan di Pakistan. Pemilihan cakupan pada tahun 2013 dikarenakan Pakistan yang terus menghadapi berbagai tantangan terkait pendidikan perempuan dengan adanya peristiwa yang terdahulu dan pada tahun tersebut Organisasi Malala Fund muncul dan aktif dijalankan oleh Malala Yousafzai dengan tujuan untuk melawan diskriminasi gender dalam mengakses pendidikan, organisasi ini juga ada untuk mengadvokasi pendidikan perempuan dalam mencapai

kesetaraan pendidikan bagi semua anak perempuan. Kemudian pemilihan tahun 2014-2015 organisasi Malala Fund berperan penting dalam mengamankan komitmen mengenai pendidikan gratis, aman dan berkualitas. Hal ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga Internasional seperti: *Aware Girls*, UNESCO, dan Pemerintah (“About | Malala Fund.”). Setelah tahun 2015, Malala Fund tetap aktif mengadvokasi hak-hak pendidikan anak perempuan di Pakistan. Terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, Malala Fund terus bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki akses terhadap pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun. (Pakistan | Malala Fund)

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis ingin menyertakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bentuk rujukan dalam menulis penelitian ini. Melihat bahwasannya penelitian mengenai hak perempuan di Pakistan yang cenderung telah banyak diambil sejak kemunculan Taliban telah menjadikan beberapa penelitian mengenai hal tersebut, tidak lain dalam beberapa penelitian terdahulu mengulas mengenai kesetaraan hak perempuan di Pakistan. Contohnya adalah (Samina malik & Kathy Courtney 2011), (Nathalène 2019), (Walters, Rosie 2016), dan (Askari A, Jawed A & Askari S)

Dalam jurnal pertama yang ditulis oleh (Samina malik & Kathy Courtney, 2011) yang berjudul *Higher education and women’s empowerment in Pakistan*, menjelaskan mengenai sebuah bentuk pendidikan yang tinggi dan pemberdayaan

perempuan di Pakistan yang menjadi poin utama bagi masyarakat Pakistan dalam memberikan perubahan sosial. Jurnal ini menganalisis mengenai awal terjadinya perampasan hak perempuan dalam hal pendidikan disebabkan pada diskriminasi Gender. Dimulai dari rumah, yang cenderung lebih menyukai anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, sebagian besar perempuan telah dikecualikan dalam beberapa aspek seperti dalam berkontribusi pengambilan keputusan dan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan mereka sebagai perempuan. Permasalahan diskriminasi ini menjadi konflik yang cukup serius, karena pada dasarnya perempuan tidak diberikan bekal pendidikan dan tidak mendapat kesempatan dalam menempuh pendidikan para perempuan di Pakistan. Sehingga perempuan di Pakistan yang tidak memiliki pendidikan cenderung tidak dihormati.

Kedua, Nathalène, 2019 dalam jurnalnya yang berjudul *On Malala Yousafzai's Contribution to Improving the Situation of Pakistani Women*, bahwa menyiratkan perjuangan yang dilakukan oleh Malala Yousafzai di negaranya telah menarik perhatian negara Internasional. Kontribusi Malala dalam jurnal ini merupakan sebuah perjuangan yang panjang, perubahan adanya kesetaraan ini menjadikan ujung tombak dalam mentalitas, namun juga pada pembangunan sosial. Yousafzai yang juga telah memberanikan diri dalam menuntut populasi perempuan memasuki ranah profesional tanpa adanya perbedaan ras. Di dalam penelitian ini Malala juga kembali memanfaatkan kondisi perempuan di Amerika Utara dan Eropa Barat dalam konflik revolusi feminim yang sejak abad-21 melakukan kontribusi dengan ilmuwan politik

besar (kekacauan global). Hal ini dikarenakan Barat yang mengawali memulai pembahasan pada permasalahan perempuan ‘Timur’.

Ketiga, Rosie, 2016 mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul *Shot Pakistani girl’: The limitations of girls education discourses in UK newspaper coverage of Malala Yousafzai*, bahwa pada liputan surat kabar di Inggris menemukan tentang adanya keterbatasan pendidikan anak perempuan yang disuarakan oleh Malala Yousafzai. Analisis pada jurnal ini lebih menunjukkan pada media Inggris mengenai kisah Yousafzai dalam mereproduksi wacana yang terlihat hanya emansipatif pada seputar pendidikan anak perempuan, yang akhirnya justru dibatasi oleh orientalis dan gender yang masih terus berkepanjangan. Namun dalam jurnal ini media Inggris lebih menggapai Yousafzai sebagai gadis Pakistan yang ‘ditembak’ dibanding menyebutnya berani, penyintas atau feminis.

Dan yang terakhir oleh Askari A, Jawed A & Askari S dalam jurnalnya berjudul *Women Education in Pakistan: Challenges and Opportunities*, menyoroti tantangan dan pandangan mengenai pendidikan perempuan di Pakistan. Dikatakan bahwa Pakistan menjadi negara yang menjadi topik diskusi dalam permasalahan pendidikan perempuan. Dimana, pendidikan perempuan di Pakistan telah menghadapi banyak tantangan diantaranya dalam hal kemiskinan, norma budaya, dan kurangnya fasilitas pendidikan. Walaupun adanya peran pemerintah dalam mempromosikan pendidikan, masih menuai tantangan yang menjadi penghalang perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan. Melihat pandangan mengenai norma budaya yang konservatif terhadap kurangnya fasilitas pendidikan, kelangkaan tenaga pendidik perempuan dan

keamanan yang menjadi tantangan utama di Pakistan. Akan tetapi, dalam jurnal ini juga menjelaskan peluang yang didapatkan dalam meningkatkan pendidikan perempuan di dalam negeri seperti adanya peran dari pemberdayaan perempuan, pemerintah dan teknologi.

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas yang telah diteliti, secara umum keseluruhan menjelaskan mengenai konflik hak kesetaraan perempuan maupun dalam sisi pendidikan di Pakistan, dimana perempuan cenderung dibedakan oleh kaum laki-laki di Pakistan. Melihat keadaan pendidikan di Pakistan merupakan permasalahan bangsa yang penting. Sejak munculnya taliban Pakistan hal tersebut mulai terjadi dan tindak kekerasan yang terjadi kepada Malala Yousafzai yang telah mendirikan salah satu Organisasi Malala Fund serta berusaha untuk menyuarakan hak perempuan dalam menempuh pendidikan. Akan tetapi, dalam penulisan ini ingin lebih menganalisis mengenai strategi dari Organisasi Malala Fund dalam memberikan fasilitas kepada perempuan di Pakistan yang tidak mendapatkan hak pendidikan anak Perempuan. Dalam perbedaan penelitian sebelumnya bahwa tidak mencantumkan tahun yang lebih spesifik mengenai strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Organisasi Malala fund di tahun 2013-2015. Sehingga penulis tertarik untuk lebih membuat penelitian ini dengan konsep mengenal pemberdayaan *NGOs* dalam paradigma baru bagi masyarakat sipil yang dikemukakan oleh Stromquist 2002 dalam menganalisis strategi Malala Fund dalam menyuarakan hak pendidikan perempuan di Pakistan tahun 2013-2015.

1.6 Kerangka Pemikiran

Malala Fund menggunakan konsep *Empowerment Theory* yang dikemukakan oleh Stromquist 2002 untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Pendidikan perempuan di Pakistan. Pada dasarnya konsep Stromquist 2002 menjelaskan mengenai sebuah organisasi *NGO* merupakan organisasi yang penting dalam mendorong pemberdayaan dalam pengembangan masyarakat. Adanya *NGO* ini sendiri telah menjadi fungsi dalam melatih masyarakat untuk mandiri dan membangun kapasitas setiap individu. *NGO* sendiri menjadi organisasi yang mengacu hampir tidak mendapat sponsor oleh pemerintah, konsep ini bertujuan agar turut berkontribusi mengurangi penderitaan pada manusia serta menyuarakan pembangunan negara miskin dengan metode seperti penyedia pelayanan, mendanai proyek dan membangun kapasitas. Dengan berjalannya waktu, *NGO* telah mempromosikan pengembangan masyarakat melalui berbagai kegiatan pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Tidak hanya peningkatan, namun teori ini juga memberikan promosi dalam bentuk otonomi dan pemberdayaan masyarakat yang telah membantu sekelompok masyarakat dan secara partisipatif ikut memfasilitasi proses dalam pemberdayaan masyarakat (Stromquist 2002).

Pada pendekatan Stromquist 2002 ingin menumbuhkan kekuatan sosial yang erat dan kuat dalam proses perubahan yang efektif. Sedangkan dalam pengembangan masyarakat perlu mencoba untuk memberikan tantangan baru bagi masyarakat dalam membangun kerjasama yang lebih di beberapa pihak. Alasan tersebut agar masyarakat

dapat hidup dalam lingkungan yang lestari secara sosial termasuk perekonomian mereka. Adanya *NGO* menggerakkan masyarakat agar menjadi mandiri, tujuan ini dapat membantu masyarakat menemukan potensi dan memberdayakan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan di akhir kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat berkelanjutan (Roseland 2000). Diulas oleh Desai (2005) bahwa *NGO* menjadi salah satu organisasi dalam membantu perempuan, laki-laki dalam memenuhi kesejahteraan mereka, ia mengatakan bahwa peran dari *NGO* ini dapat berupa advokasi, peningkatan kesadaran, dukungan dan layanan konseling.

Adapun tiga fungsi *NGO* dalam memberdayakan masyarakat dengan menggunakan strategi pemberdayaan menurut Stromquist (2002) diantaranya adalah:

1. Penyampaian layanan, pada fungsi penyampaian layanan bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan dalam menjalin kemitraan guna mendukung kebutuhan kepada masyarakat.
2. Penyediaan pendidikan, *NGO* memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, mendukung masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat melalui program-program pendidikan.
3. Advokasi kebijakan publik, menurut Stromquist bagaimana *NGO* berperan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan dan upaya perjuangan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Bila diaplikasikan dalam menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh penulis mengenai strategi organisasi Malala Fund dalam memperjuangkan hak pendidikan Perempuan, konsep ini cukup sesuai karena dari sisi Malala Fund yang menjadi penyedia pelayanan, penyedia pelayanan pendidikan dan advokasi kebijakan publik dalam membantu menyuarakan hak pendidikan oleh perempuan di Pakistan. Seperti halnya keterlibatan dari pihak lembaga otoritas yang membantu organisasi Malala Fund dalam memajukan dan mensejahterakan pendidikan perempuan dan anak-anak, diantaranya: *Aware Girls*, UNESCO, dan pemerintah Pakistan. Hal ini karena peran penting organisasi *NGO* tidak lain seperti Malala Fund yang memberikan fasilitas secara konsisten dalam strategi pengembangan masyarakat, pengembangan kemampuan, jaringan yang efektif antara pemangku kepentingan, perencanaan pendanaan, peningkatan kualitas hidup berkelanjutan dan advokasi.

1.7 Argumen Sementara

Malala Fund menjadi salah satu organisasi yang memberdayakan perempuan di bidang pendidikan sebagai bentuk untuk mengembangkan kemampuan, perencanaan pendanaan dan peningkatan kehidupan yang berkelanjutan. Dalam memberikan gambaran akhir pada penelitian ini terdapat tiga strategi atau fungsi menurut Stromquist (2002) yang telah dilakukan oleh Malala Fund sebagai organisasi *NGOs* dalam membantu pemberdayaan perempuan di Pakistan, meliputi:

1. Strategi dalam membantu penyampaian layanan, pada dasarnya dilakukan oleh Malala Fund dalam memberikan informasi mengenai akses dan peningkatan kualitas terhadap anak perempuan yang tidak dapat menempuh pendidikan. Diantaranya dengan melakukan kolaborasi dan mendapatkan bantuan program oleh UNESCO.
2. Strategi sebagai penyedia pendidikan, kembali pada tujuan dibentuknya organisasi Malala Fund sendiri sebagai wadah untuk perempuan yang kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikan mereka khususnya di wilayah negara berkembang. Melalui peran yang dimiliki Malala Fund dalam menyediakan pendidikan bagi perempuan, membantu para perempuan melalui dukungan finansial dan membantu mengembangkan program aktivis perempuan yakni *Education Champion Network*.
3. Strategi mengadvokasi kebijakan publik, Malala Fund melakukan advokasi kebijakan publik dalam mendukung pendidikan anak perempuan diantaranya dimana upaya Malala Fund menyuarakan Pendidikan perempuan melalui pidato, kampanye dan aktif pada media sosial. Serta adanya upaya pemerintah untuk membantu Malala Fund dalam mengadvokasi perubahan bagi perempuan.

Tiga strategi dari fungsi tersebut membantu memberdayakan setiap individu dan komunitas Malala Fund dalam membantu memenuhi bentuk dari pemberdayaan tersebut kepada perempuan di Pakistan yang tidak mampu mendapat akses pendidikan. Sehingga pendekatan pemberdayaan menurut

Stromquist ini menjadi salah satu wujud hasil dari Malala Fund sebagai organisasi *NGO* dalam memberikan dukungan bantuan kepada masyarakat di Pakistan di bidang pendidikan, serta pemberdayaan merupakan hal yang patut untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian model deskriptif, dimana penulis juga mengamati dan mengumpulkan data faktual berdasar pada strategi yang dilakukan organisasi Malala Fund dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Malala Fund sebagai organisasi *NGOs* di Pakistan yang didirikan untuk membantu isu pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Subjek dari penelitian ini adalah Malala Fund, Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi dari organisasi Malala Fund dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari sumber Buku, Jurnal, Website resmi, badan kementerian pendidikan pemerintah Pakistan, UNICEF, serta data pada bacaan berita di

Internet. Sumber data ini menggunakan data sekunder, dimana melihat analisis data yang sudah digunakan pada penelitian lain dalam menjawab isu penelitian tersebut.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini, diawali dengan melihat berbagai literatur bacaan dan laporan yang berhubungan pada penelitian yang akan diangkat. Proses penelitian pengambilan data kualitatif dengan memeriksa data yang diambil melalui media online maupun website resmi dari isu penelitian tersebut. Kemudian berdasarkan data uraian yang telah didapat, membuat analisis menjadi konsep dan hipotesis yang diperoleh.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun beberapa bab tersebut sebagai berikut:

A. BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang terjadinya dinamika isu pendidikan perempuan di Pakistan serta penjelasan singkat mengenai profil Malala Fund dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

B. BAB 2: Kemunculan Organisasi Malala Fund dalam Mendukung Pendidikan Bagi Perempuan di Pakistan

Pada bagian bab kedua penulis akan membahas isu kesenjangan yang dilanjutkan dengan faktor dan kondisi yang melatarbelakangi dari isu pendidikan di Pakistan khususnya bagi perempuan dan anak-anak serta kemunculan Malala Fund dalam membantu memperjuangkan hak bagi perempuan.

C. BAB 3: Strategi 'Malala Fund' dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Pakistan Tahun 2013-2015

Pada bagian bab ketiga penulis menganalisis mengenai Malala Fund dan menjawab rumusan masalah tentang strategi yang telah dilakukan Malala Fund dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan di Pakistan, serta menganalisis dengan mengaplikasikan konsep yakni mengenal *NGO dalam paradigma baru bagi masyarakat sipil* dalam membantu uraian bab ini.

D. BAB 4: Penutup

Pada bab keempat penulis akan menyampaikan dan memberikan saran serta rekomendasi dalam melanjutkan penelitian penulis.

BAB 2

PERMASALAHAN KESENJANGAN DAN LEMAHNYA PENDIDIKAN PEREMPUAN SERTA KEMUNCULAN ORGANISASI MALALA FUND DALAM MENYUARAKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN

Status perempuan di Pakistan tidak merata, terlihat dari perkembangan sosio-ekonomi yang tidak sama di daerah perkotaan dan pedesaan. Kondisi perempuan di Pakistan cenderung tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan diri dan berpartisipasi dalam segala bentuk aspek kehidupan sosial. Pada sistem pemerintahan Pakistan sendiri telah didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini yang menjadi pemicu kondisi perempuan yang mengalami keterlambatan dan perkembangan baik dalam aspek kehidupan sosio-ekonomi maupun pendidikan. Kondisi mobilitas perempuan yang juga sangat dibatasi dan dikendalikan oleh laki-laki. Kemudian situasi ini juga penting untuk dilihat karena peningkatan permasalahan kesenjangan bagi perempuan yang terus menerus terjadi (Khan 2013).

Pada bab ini, berisi mengenai bagaimana kondisi yang melatarbelakangi isu kesenjangan pendidikan perempuan di Pakistan. Kemudian pembahasan kedua akan menjelaskan mengenai faktor pendukung lemahnya hak pendidikan perempuan di Pakistan yang kemudian memunculkan organisasi NGO dalam membantu perempuan agar bisa memperjuangkan hak mereka, organisasi ini dinamai dengan organisasi Malala Fund.

2.1 Kesenjangan Pendidikan Perempuan di Pakistan

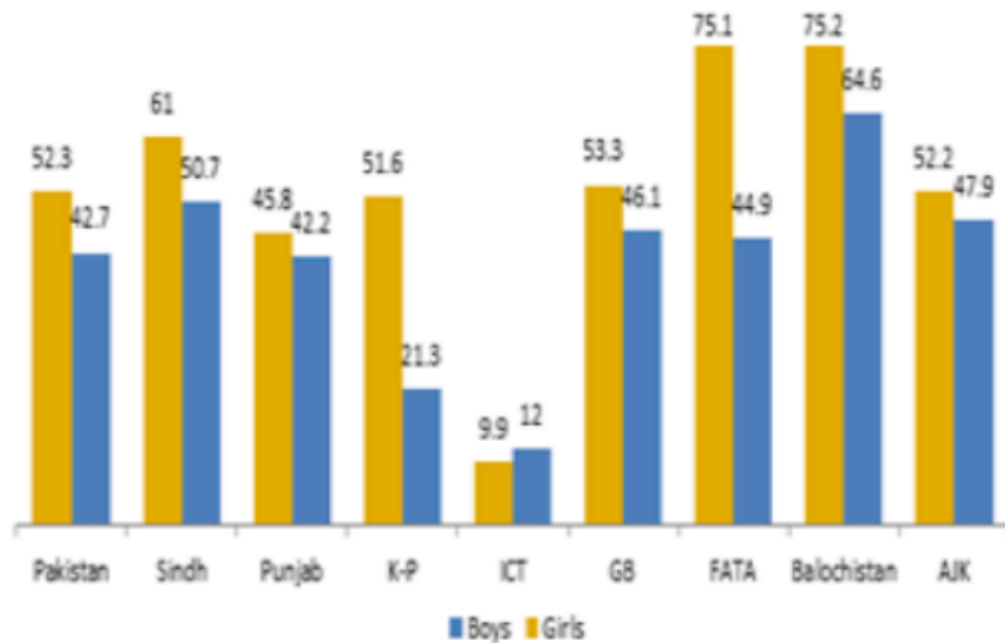
Berdirinya Malala Fund bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang dialami perempuan di Pakistan dan memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki akses terhadap pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun. Malala Fund berupaya mengurangi kesenjangan dalam pendidikan perempuan di Pakistan melalui beberapa inisiatif yakni dengan melakukan kemitraan lokal, peningkatan pendanaan Pemerintah, peningkatan kapasitas, dan pengembangan masyarakat (Khan 2013). Pada tahun 2015, menjadi salah satu krisis moral terbesar di dunia yang dihadapi perempuan yakni diskriminasi dan hambatan, termasuk undang-undang yang diskriminatif, kekerasan domestik, hambatan ekonomi, dan kurangnya kesetaraan dalam upah dan representasi politik (Iqbal 2013).

Pakistan dikenal sebagai negara republik parlementer federal yang terdiri dari empat provinsi dan empat wilayah federal dengan populasi lebih dari 176 juta jiwa, diantaranya merupakan negara yang cukup beragam baik secara etnis, budaya, bahasa, pendidikan dan sosial ekonomi. Pakistan sendiri merupakan salah satu negara dimana anak perempuan lebih banyak dirugikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada tulisan Gouleta (2014) bahwa dengan angka partisipasi pendidikan perempuan yang berjumlah 16% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan Pakistan merupakan negara ketiga setelah India dan Nigeria dengan jumlah anak perempuan yang putus sekolah dasar dengan jumlah 4,2 juta (Goulet 2014).

Pakistan menduduki peringkat kedua dengan jumlah anak putus sekolah dasar yang terbanyak kedua. Menurut survei yang dilakukan UNESCO, sekitar 30% dari penduduk Pakistan hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dimana mereka hanya mempunyai 2 tahun pendidikan dasar (UNICEF, 2013). Menurut data statistik, di Pakistan ada terdapat 19,6 juta anak usia sekolah dasar dari hampir 6,9 juta anak tidak bersekolah dan sekitar 60% dari jumlah ini adalah perempuan. (UNESCO, 2014) Di Pakistan, anak perempuan menghadapi banyak hambatan dalam hal pendidikan. Diperkirakan sekitar 62% anak perempuan tidak bersekolah dan mereka tidak mempunyai peluang untuk bersekolah dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 27% (UNICEF 2013). Laporan yang sama mengatakan bahwa sekitar 43% perempuan menghadapi diskriminasi agama di tempat kerja, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya (UNICEF 2013).

Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah anak putus sekolah di Pakistan berdasarkan gender pada tahun 2015 dan selanjutnya mengklasifikasikan angka tersebut berdasarkan provinsi untuk mengetahui alasan geografis yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan di berbagai provinsi di negara tersebut.

Gambar 2.1 Anak Putus Sekolah Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin



Sumber: Pakistan Education Statistics, 2014-15 (2015)

Pada gambar diagram diatas menunjukkan distribusi presentase anak-anak yang putus sekolah berdasarkan pada gender dan provinsi, Hal ini menunjukkan bahwa 52,3% perempuan di Pakistan tidak bersekolah, sedangkan 42,7% laki-laki tidak bersekolah. Bisa ditekankan bahwa secara jelas hanya anak perempuan yang tidak bersekolah. Terlihat pada empat wilayah provinsi di Pakistan yakni Sindh 61% anak perempuan tidak bersekolah, sedangkan Punjab presentase anak perempuan tidak bersekolah yakni 45,8% (Pakistan Education Statistics 2014-15). Di Kyber Pakhtunkhwa berjumlah 51,6% anak perempuan yang tidak bersekolah sedangkan Balochistan berjumlah 75,2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rendah

pendidikan ada pada Balochistan dan Sindh. Walaupun di Punjab terbilang lebih dari sepuluh anak perempuan bersekolah masih menunjukkan fasilitas pendidikan lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pakistan (Pakistan Education Statistics 2014-15).

Lima juta anak tidak bersekolah pada tingkat dasar, dan 60% di antaranya adalah perempuan. Namun, karena berbagai hambatan termasuk kurangnya sekolah terdekat, kekurangan staf pengajar dan ketidakhadiran, kualitas pengajaran yang buruk, miskin lingkungan sekolah, dan ketidakamanan budaya, tata kelola yang lemah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam urusan sekolah merupakan hambatan utama terhadap pendidikan perempuan (Malik 2015). Seperti yang diungkapkan oleh Iqbal (2013) telah menemukan kesenjangan terbesar dalam pendidikan perempuan di tingkat sekolah menengah, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Penyebab utama ini dilatarbelakangi dari sisi keyakinan agama norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya yang menghambat perempuan dalam menempuh pendidikan. Secara spesifik, norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya memperbolehkan perempuan hanya untuk mengabdikan pada keluarganya sebagai istri dan ibu. Hasilnya, memang demikian tidak mengizinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam program swasta dan sosial apa pun aktivitasnya (Iqbal 2013).

Meski pendidikan anak perempuan menjadi prioritas, seringkali mereka belajar bahwa peran mereka bukanlah sebagai pemimpin. Kurikulum yang

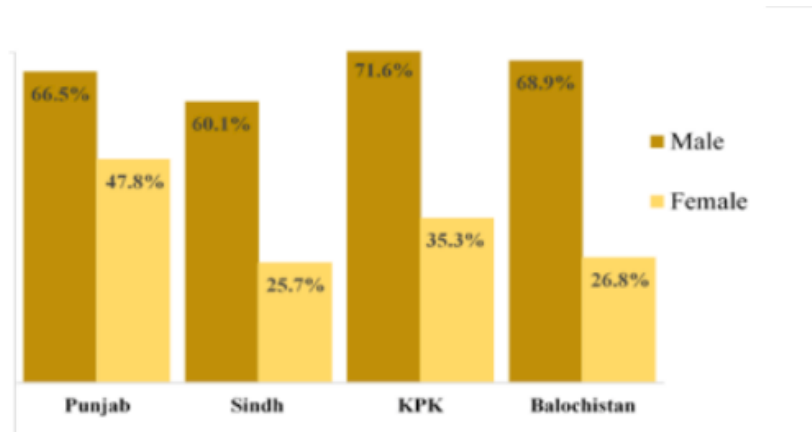
diskriminatif, kurangnya mentor, dan sistem pendidikan yang kurang fokus pada keterampilan lunak dan kepemimpinan juga menjadi masalah.

2.1.1 Keterbatasan Hak Pendidikan Perempuan pada Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Pakistan

Pakistan adalah negara agraris dan proporsinya jumlah penduduk tertinggi terdapat di daerah pedesaan. Sebagian besar perguruan tinggi dan universitas berlokasi di daerah perkotaan Pakistan, menjadikan perjalanan sebagai hambatan utama bagi perempuan pedesaan untuk mengakses pendidikan tinggi di Pakistan. Itu perbedaan pembagian wilayah desa-kota disebabkan oleh lingkungan sekitar, peluang pendidikan, prasarana lembaga pendidikan, dan ketersediaan sarana pendidikan (Batool 2013).

Populasi tingkat melek huruf berbeda-beda antara pedesaan dan perkotaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih jauh dari hal fasilitas pendidikan. Sedangkan daerah perkotaan lebih terkena dampak terbaik dan fasilitas pendidikan terkini. Namun untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya yang lebih terintegrasi diperlukan yang harus diarahkan kepada masyarakat miskin pedesaan yang tidak bisa menyekolahkan anaknya hanya karena keterbatasan finansial (Ashraf 2015).

Gambar 2.1.1 Angka Melek Huruf di beberapa Daerah Provinsi khususnya di wilayah pedesaan



Sumber: *Pakistan Social and Living Standards Measurements Survey* (2014-2015)

Dari diagram diatas sebagaimana dapat menjadi contoh, dimana dari dua provinsi di daerah pedesaan yang ada di Pakistan yakni Punjab menjadi negara maju dengan sistem pendidikan sedangkan dan Kyber Pakhtunkhwa yang menjadi provinsi dengan banyaknya anak perempuan tidak dapat bersekolah.

Punjab adalah provinsi terbesar, terpadat dan maju di Pakistan. Ini memiliki mayoritas lahan pertanian di negara ini, yang mencakup hampir 56% dari total penduduk dimana 3,8 juta orang berusia di atas 15 tahun buta huruf (Rehman, Jingdong, & Hussain, 2015). Populasi di Punjab diperkirakan mencapai 10,20 juta pada tahun 2014 (Ekonomi Survei Pakistan 2013-14). Tingkat melek huruf di Punjab pada tahun 1972 adalah 20,07% dan telah meningkat menjadi 61% setelah bertahun-tahun hingga 2014 (Rehman et al., 2015).

Sedangkan Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), sebelumnya dikenal sebagai Provinsi perbatasan Barat Laut, adalah provinsi terkecil dari segi luas wilayah. Populasi provinsi ini diperkirakan berjumlah 25,30 jiwa juta pada tahun 2014 (Survei Ekonomi Pakistan 2013-14). Sekitar 39% orang hidup di bawah garis kemiskinan dan masyarakat miskin sebagian besar menetap di daerah pedesaan. Hal tersebut merupakan angka melek huruf KPK dari tahun 1972 hingga 2014 dilaporkan meningkat dari 15,50% menjadi 53%, sehingga menjadikan tingkat melek huruf keseluruhan di provinsi ini menjadi 50% (Rehman dkk., 2015). Di Wilayah KPK terhitung pada persentase bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, karena adanya disparitas gender regional di wilayah kesukuan dan di wilayah tersebut di daerah suku terbelakang, anak perempuan lebih mungkin menghadapi hambatan budaya dan perlakuan yang tidak memadai dalam hal sekolah mereka (Luqman, Shahbaz, Ali, & Siddiqui, 2015). Rasio pendidikan Madrasah juga lebih tinggi di provinsi ini.

Di perkotaan, tantangan utama yang dihadapi perempuan antara lain terbatasnya akses terhadap pendidikan karena kurangnya infrastruktur, kekurangan guru perempuan, dan sikap budaya yang menghambat perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, tingginya biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, seragam, dan buku, dapat menjadi hambatan besar bagi banyak keluarga. Selain itu, kurangnya transportasi yang aman dan mudah diakses dapat menyulitkan perempuan untuk bersekolah, terutama di wilayah dimana transportasi umum terbatas. Di wilayah perkotaan Pakistan selama tahun 2013-

2015, 18,3% anak perempuan tidak bersekolah. Persentase ini lebih rendah dibandingkan 78% anak perempuan yang putus sekolah di daerah pedesaan (Malik 2021). Pakistan secara keseluruhan hanya mencapai sedikit kemajuan dalam hal kesenjangan pendidikan, dan negara ini menduduki peringkat rendah dalam sub- indeks Kesenjangan Gender Global mengenai Pencapaian Pendidikan (Malik 2021).

Rasio partisipasi kasar perempuan di pedesaan dari pendidikan dasar hingga tinggi di Pakistan terhitung lebih rendah dibandingkan laki-laki di pedesaan. Perempuan dari rumah tangga yang mengadopsi pertanian sebagai profesi di daerah pedesaan diabaikan dan kurang disukai dibandingkan laki-laki. Kendala sosial, ekonomi, dan regional memengaruhi partisipasi perempuan di pedesaan dalam berbagai tingkat pendidikan di Pakistan. Di daerah pedesaan, ketimpangan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, seperti angka kemiskinan yang tinggi, kurangnya lembaga pendidikan, dan rendahnya kualitas pendidikan. Banyak wilayah pedesaan yang kekurangan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, sehingga menyulitkan sekolah untuk beroperasi secara efektif. Kekurangan ini membuat sekolah menjadi alternatif yang buruk bagi orang tua, sehingga mereka lebih memilih anak perempuan untuk bekerja di rumah daripada bersekolah. Data menunjukkan tingkat melek huruf perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki di semua provinsi di Pakistan (Farid 2014).

Keterbatasan yang menghambat perempuan dalam menempuh pendidikan di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2013-2014 sangatlah kompleks dan memiliki banyak aspek. Meningkatkan akses anak perempuan dan perempuan terhadap pendidikan bukan hanya persoalan hak asasi manusia. Dengan berinvestasi pada pendidikan perempuan, Pakistan dapat membantu memutus siklus kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang (Farid 2014).

2.1.2 Kualitas pendidikan bagi perempuan di Sektor Swasta dan Negeri

Pendidikan memainkan peran penting dalam kebangkitan dan kejatuhan suatu bangsa khususnya di abad ke-21. Hal ini disebabkan oleh munculnya persaingan global di bidang pendidikan dan teknologi. Lingkungan yang kompetitif ini adalah kebutuhan inti untuk kemajuan negara mana pun. yang dimiliki semua negara termasuk Pakistan sistem sekolah yang berbeda tetapi ketika kita membaginya kita menemukan dua kategori utama sistem sekolah swasta dan sekolah negeri (Awan 2014).

Permasalahan pada kualitas pendidikan baik di sektor negeri maupun swasta merupakan salah satu tantangan yang signifikan. Kualitas pendidikan di kedua sektor tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya infrastruktur dan sumber daya, pelatihan guru yang tidak memadai, dan terbatasnya akses terhadap kesempatan pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan

rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan, yang selanjutnya akan terus memperburuk kesenjangan gender dalam pendidikan di Pakistan (Askari 2022).

Melihat pada laporan *Pakistan Education Statistics 2013-14* terdapat jumlah data pendaftaran pendidikan di sektor publik dan swasta antara laki-laki dan perempuan. Menurut laporan tersebut, jumlah institusi pendidikan pada tingkat sekolah dasar, menengah dan atas di Pakistan adalah 243,937, dengan perbandingan jumlah 114,572 untuk perempuan dan 129,365 untuk laki-laki (PES 2015). Pada laporan tersebut juga terdapat jumlah data mengenai tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan di sektor publik dan swasta. Untuk sekolah negeri, angka partisipasi siswa perempuan adalah 38,5% sedangkan siswa laki-laki dengan total 56,5%. Untuk sekolah swasta, angka partisipasi sekolah perempuan adalah 31,4% dan laki-laki 44,1% (PES 2015).

Dari segi jumlah pendaftaran, laporan menyebutkan terdapat 17.079 siswa perempuan yang bersekolah di sekolah negeri dan 32.244 siswa laki-laki yang bersekolah di sekolah negeri. Di sekolah swasta, terdapat 4.516 siswa perempuan dan 15.844 siswa laki-laki (PES 2015). Dari data yang ada menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang signifikan dalam angka partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan, baik di sektor negeri maupun swasta. Kesenjangan ini lebih besar terjadi di sekolah negeri, dimana anak laki-laki memiliki angka partisipasi lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.

2.2 Faktor Pendukung yang Memengaruhi Lemahnya Hak Pendidikan Perempuan di Pakistan

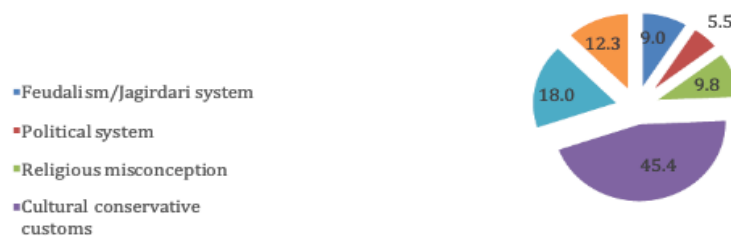
Tantangan yang dihadapi perempuan dalam menempuh pendidikan di Pakistan sangat kompleks dan melibatkan faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah norma budaya yang membatasi mobilitas perempuan, terutama di daerah yang lebih konservatif. Perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam bergerak bebas, sehingga menghalangi akses mereka ke institusi pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, partisipasi politik perempuan juga sering kali terbatas. Perempuan dianggap kurang layak atau tidak diizinkan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga memengaruhi lingkup pengaruh dan pemberdayaan mereka dalam masyarakat secara keseluruhan (Ahmad, 2014).

Selain faktor budaya dan sosial, faktor ekonomi juga menjadi penghalang bagi perempuan dalam menempuh pendidikan. Keluarga sering kali lebih cenderung menginvestasikan sumber daya keuangan mereka untuk pendidikan anak laki-laki, sedangkan pendidikan perempuan dianggap kurang prioritas. Norma sosial yang mengharapkan perempuan untuk hanya mengurus tugas rumah tangga juga dapat menghambat akses mereka ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebagaimana dibawah merupakan faktor pendukung yang cukup berpengaruh pada lemahnya hak pendidikan perempuan di Pakistan;

2.2.1 Faktor Budaya dan Sosial

Budaya Pakistan memiliki pengaruh khusus bagi perempuan di wilayah pedesaan yang berpengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan. Pandangan budaya mereka mengenai pendidikan cenderung lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Minimnya pendidikan yang didapatkan oleh perempuan disebabkan oleh faktor budaya dan sosial. Permasalahan hambatan yang dialami perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan yang diakibatkan karena faktor budaya dan sosial ini memberikan pengaruh yang tinggi dalam perkembangan diri bagi perempuan. (Shaukat & Pell, 2015).

Gambar 2.2.1 Tingkat sosial menjadi permasalahan utama pada pendidikan tinggi perempuan



Sources: Pell & Winter 2015

Gambar diatas menetapkan bahwa kebiasaan budaya konservatif menempati posisi pertama dengan hasil 45,4% untuk menjauhkan anak perempuan dari institusi pendidikan tinggi. Faktor kedua yang paling berpengaruh adalah diskriminasi gender dengan dampak sebesar 18% yang

berdampak serius pada pendidikan tinggi anak perempuan. Demikian pula persepsi orang tua mengenai ancaman terhadap kehormatan keluarga jika anak perempuan mereka diterima di perguruan tinggi atau universitas menambah kebencian terhadap pendidikan tinggi dengan hasil sebesar 12,3% (Pell & Winter, 2015). Hasil di atas mengungkapkan bahwa masyarakat Pakistan masih menganut adat istiadat konservatif terkait dengan pemberdayaan perempuan, namun jika kita ingin menumbuhkan masyarakat dengan persamaan hak dan kewajiban maka kita harus mengatasi pengaruh adat istiadat konservatif terhadap masyarakat. (Pell & Winter, 2015). Norma budaya merupakan salah satu hambatan signifikan terhadap pendidikan perempuan di Pakistan. Perempuan sering kali diharapkan untuk memprioritaskan tanggung jawab rumah tangga seperti pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak dibandingkan pendidikan.

Pada pandangan sosial, perempuan menghadapi lebih banyak tuntutan sosial dan konvensional serta lebih diandalkan atas untuk menjaga rumah untuk pertimbangan keluarga. Laki-laki menguasai sebagian besar sumber daya, sehingga perempuan mempunyai lebih sedikit sumber daya akses terhadap pendidikan dan mengungkapkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah kumuh atau terpencil dibatasi menikmati hak-hak mereka terutama layanan kesehatan dan akses terhadap pendidikan (Maliha dan Venkut, 2014).

2.2.2 Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Pendidikan di Pakistan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sektor swasta dan publik. Sekolah swasta menawarkan pendidikan berkualitas yang lebih baik dibandingkan sekolah negeri, dan orang tua umumnya lebih puas dengan sekolah swasta. Namun, biaya yang tinggi di lembaga swasta hanya menjadikan jangkauan bagi masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi. Keluarga berpendapatan rendah cenderung memilih sekolah negeri karena mereka tidak mampu membiayai sekolah swasta. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi berhubungan dengan tingkat melek huruf yang rendah (Nolan et al., 2014).

Terhitung 80% di wilayah minoritas Pakistan dikategorikan sebagai penduduk miskin karena 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan (Abbasi 2011). Pendidikan perempuan memainkan peran penting dalam kemajuan dan pembangunan komersial. Namun, rendahnya partisipasi perempuan di pasar kerja diyakini disebabkan oleh kendala sosio-ekonomi yang timbul dari struktur masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Pendidikan perempuan dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi, norma, manfaat, dan peran tradisional perempuan. Di Pakistan, tingkat penerimaan sekolah untuk anak perempuan rendah, dengan hanya 28% anak perempuan yang bersekolah di tingkat dasar dan hanya 11% yang melanjutkan ke sekolah menengah (Ujan 2011). Angka putus sekolah juga tinggi, dan anak perempuan cenderung tinggal di rumah untuk melakukan

tugas-tugas domestik dan merawat anggota keluarga (Channar, Abassi, Ujan, 2011).

Laki-laki berusaha dengan kekuatan dan dorongan untuk mempertahankan otoritas mereka atas sumber daya (untuk kondisi ini, politik dan keuangan memengaruhi). Pemerintah Pakistan terus mengalokasikan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi pendidikan sejak awal berdirinya. Tingkat PDB dikatakan meningkat hingga 4% tetapi terus berlanjut rata-rata negara ini membelanjakan sekitar 2% PDB dalam 20 tahun terakhir. Karena kekurangan keuangan, terdapat kekurangan sekolah yang didanai negara khususnya di wilayah pedesaan. Itu Jumlah sekolah perempuan di daerah pedesaan sangat sedikit sehingga anak perempuan tidak mampu bersekolah mengakses pendidikan (UNESCO 2013).

2.3 Kemunculan Organisasi Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan bagi Perempuan di Pakistan

Selain dari faktor pendukung diatas yang menyebabkan adanya kesenjangan pendidikan yang dialami oleh perempuan di Pakistan, memunculkan upaya dari NGO dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan perempuan di Pakistan. Seperti halnya melalui program mereka yang berusaha meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi perempuan dan memberikan dukungan finansial serta bantuan lainnya kepada mereka yang kesulitan dalam mendapatkan

hak pendidikannya. Mengenal NGO yakni merupakan Organisasi non-Pemerintah (NGO). Mereka muncul untuk mengatasi permasalahan sosial, melindungi hak, dan meningkatkan kualitas hidup individu yang terpinggirkan tanpa ada diskriminasi budaya, agama, wilayah, dan sikap sosial. NGO juga membantu dalam hal kemanusiaan, memperkuat kapasitas lokal, dan membangun kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan hidup berkelanjutan seperti pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pencegahan kekerasan. Mereka berperan sebagai penyedia layanan langsung bagi kelompok rentan untuk memperluas kegiatan kesejahteraan di suatu wilayah (Kahlon, 2015).

Mengenal salah satu NGO yang ada di Pakistan dengan tujuan memajukan hak pendidikan perempuan yakni dikenal sebagai Organisasi '*Malala Fund*', Organisasi ini didirikan oleh salah seorang perempuan di Pakistan yang sebelumnya juga telah mengalami tindakan serangan oleh Taliban di tahun 2012. Malala Yousafzai yang dikenal sebagai salah satu aktivis perempuan yang berasal dari Pakistan dan aktif dalam menyuarakan hak pendidikan bagi perempuan dengan mendirikan salah satu organisasi NGO yakni '*Malala Fund*'. Malala Fund merupakan organisasi non-pemerintah yang aktif pada tingkat lokal, nasional dan global. Organisasi ini merupakan sebuah perjuangan Malala Yousafzai yang sangat aktif dalam menyuarakan mengenai hak pendidikan bagi perempuan. Malala Fund telah berupaya untuk mewujudkan pendidikan gratis di Pakistan. Terlihat peran Malala Yousafzai sebagai pemuda yang mendirikan organisasi non-pemerintah dan berfokus pada pendidikan (Raphel 2014).

Malala Fund dimulai pada awal tahun 2013 di tanggapan terhadap gelombang dukungan publik pada serangan di bulan Oktober 2012 terhadap kehidupan Malala Yousafzai. Sejak kemudian, Malala Yousafzai menjadi pemimpin gerakan untuk pendidikan anak perempuan, aktivismenya yang berkelanjutan telah membangun momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi anak perempuan pendidikan dan kesetaraan di seluruh dunia. Sejak 2013, Malala Fund telah menginvestasikan lebih dari \$17 juta hibah terprogram dan saat ini berfungsi di tujuh negara (Afghanistan, Brazil, India, Lebanon, Nigeria, Pakistan dan Turki). Pada tahun 2014 dan 2015, Malala Fund berperan penting dalam mengamankan komitmen untuk 12 tahun pendidikan yang gratis, aman, dan berkualitas secara berkelanjutan. Tujuan Pembangunan (SDGs) dan meyakinkan Kemitraan Global untuk pendidikan (GPE), dan sebagai pendonor untuk memperluas mandat organisasi pendidikan menengah atas. Dengan menyematkan Komitmen 12 tahun dalam pendidikan global sistem, kami meletakkan dasar untuk pekerjaan Malala Fund di masa depan (Lei dan Royle 2020).

Adapun pada Istilah “*Financing Upper Secondary Education: Unlocking 12 Years of Education for All*”, dimana Malala Fund membuat strategi untuk melakukan mobilisasi sumber daya keuangan khususnya untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, meningkatkan efisiensi belanja dan memastikan distribusi sumber daya yang adil untuk mendukung inisiatif dalam program pendidikan. Serta tujuan ini juga sebagai penyedia pendidikan 12 tahun Malala memastikan

bahwa setiap anak perempuan dapat bersekolah tanpa adanya memandang gender, status sosial ekonomi, atau latar belakang, dan memiliki akses terhadap siklus pendidikan penuh. Inisiatif ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi anak-anak menyelesaikan pendidikan mereka dan untuk mendorong kesempatan belajar yang inklusif dan adil bagi semua (Shubha dan Patel 2015).

Pada ringkasan tulisan tersebut, Tahun 2015 akan menandai peluncuran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang ambisius upaya multi-pemangku kepentingan yang didasarkan pada Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) untuk menguraikan serangkaian hasil dan target global untuk 15 tahun ke depan. Analisis ini bertujuan untuk menginformasikan topik-topik utama yang sedang dieksplorasi menjelang PBB Pertemuan puncak pada bulan September 2015 untuk mengadopsi agenda pembangunan pasca-2015, khususnya terkait dengan tema strategi pembiayaan pembangunan dan pendidikan. Empat kunci Temuan terkait universalisasi pendidikan menengah atas tanpa biaya diantaranya:

- a. Tercapainya pendidikan bebas biaya akan meningkatkan pangsa pendidikan antara 4,20%– 6,91% PDB selama tahun 2015–2030.
- b. Proyeksi biaya pendidikan bebas biaya memang terbukti bahwa akses universal bebas biaya di seluruh pra-sekolah dasar, dasar, menengah bawah, dan menengah atas sekolah memberikan beban yang signifikan pada kategori 3 dan 4 negara. Peningkatan substansial pada sektor eksternal pendanaan akan dibutuhkan untuk mendukung hal ini negara-negara secara bertahap memberikan

akses yang lebih besar untuk pendidikan bebas biaya di tingkat pasca-sekolah dasar.

- c. Perhatian yang signifikan harus diberikan untuk memastikannya ketidakadilan tidak diperburuk dengan adanya pengalihan sumber daya jauh dari menjamin akses dan pembelajaran berkualitas hasil pada tingkat pendidikan yang lebih rendah.
- d. Pendekatan bertahap ke bagian atas bebas biaya pendidikan menengah, pertama menargetkan anak perempuan dan pemuda terpinggirkan lainnya, mungkin adalah yang paling banyak strategi yang tepat untuk melakukan universalisasi akses untuk pendidikan pada tingkat ini (Shubha dan Patel 2015).

Hal ini menandakan sejalanannya dengan bagaimana strategi Malala Fund untuk memperjuangkan hak Pendidikan perempuan di Pakistan. Dalam hal lain Malala Fund juga upaya Malala Fund yang tak kenal lelah di Pakistan tidak hanya menyoroti hak dasar bagi perempuan atas pendidikan namun juga membuka jalan bagi generasi mendatang untuk membangun masyarakat yang lebih adil melalui kekuatan pembelajaran yang transformatif.

BAB 3

STRATEGI *MALALA FUND* DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2013-2015

Dengan adanya peran *Malala Fund* dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan bagi perempuan di Pakistan yang tidak lain bertujuan untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan pada tahun 2013-2015. Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peranan tersebut melalui konsep *Empowerment Theory* yakni mengenal *NGO dalam paradigma baru bagi masyarakat sipil* yang dikemukakan oleh Stromquist 2002 dengan strategi sebagai penyampaian layanan, sebagai penyedia pendidikan dan membantu dalam advokasi kebijakan publik.

3.1 Strategi *Malala Fund* dalam Membantu Penyampaian Layanan

Pada dasarnya, pendidikan menjadi salah satu hak yang perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat adanya ras, kelamin dan agama. Kemunculan adanya diskriminasi yang terjadi di Pakistan khususnya bagi perempuan dalam hal pendidikan, mencerminkan bahwa pemerintah telah menyalahi hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh setiap manusia secara adil. Kemunculan *Malala Fund* yang bertujuan untuk menuntut dan memperjuangkan hak agar perempuan maupun anak-anak dapat memiliki serta menerima pendidikan yang layak,

berupa 12 tahun Pendidikan gratis, aman dan berkualitas. Peran yang dimiliki oleh Malala Fund sebagai komunitas global dalam mengurangi diskriminasi hak pendidikan bagi perempuan di Pakistan dengan melakukan berbagai tindakan baik dalam kerjasama dengan pemangku kepentingan maupun dengan organisasi lokal agar nilai dan visi yang dilakukan organisasi Malala Fund dapat tercapai (AHRC 2014).

Dalam mengimplementasikan analisis permasalahan pendidikan perempuan di Pakistan melalui strategi penyampain layanan, dalam hal ini Malala Fund menjadi aktor kunci dalam memberikan salah satu strategi layanan kepada perempuan dalam menempuh pendidikan. Tidak lain bahwa dengan adanya peran Malala Fund sebagai NGO semakin terlihat dan diakui kemampuannya dalam upaya mendorong pemberdayaan dan mendorong pembangunan partisipatif bagi perempuan, sehingga strategi penyampaian layanan tidak hanya berlaku pada kebutuhan mendesak akan tetapi hal ini mencakup aktivitas intervensi nyata bagi Malala Fund sebagai NGO untuk mengatasi tantangan sosial maupun permasalahan di setiap negara (Stromquist, 2002).

Melalui strategi penyampaian layanan dibawah ini, Malala Fund membentuk dan menerima layanan dalam menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi perempuan. Dalam penyampain layanan pertama Malala Fund menerima layanan bantuan program yang didirikan pemerintah dan UNESCO yang bertujuan untuk membantu perempuan menerima hak pendidikan mereka. Kedua; upaya layanan

kolaboratif antara Malala Fund dan *Aware Girls* dalam memperkuat pendidikan bagi perempuan di Pakistan.

3.1.1 Upaya Layanan Kerjasama Malala Fund dalam Memperkuat Pendidikan bagi Perempuan di Pakistan

Malala Fund dikenal sebagai NGO yang didirikan oleh Malala Yousafzai, telah berupaya dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan di Pakistan melalui berbagai upaya layanan kerjasama dengan organisasi lokal *Aware Girls* dan UNESCO.

Malala Fund berkolaborasi dengan organisasi lokal di Pakistan yakni *Aware Girls*, untuk mendukung pendidikan perempuan dan anak perempuan. Kolaborasi ini dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan kebijakan yang mendorong pendidikan perempuan dan anak perempuan di Pakistan (Malala Fund | Education Girl).

Aware Girls adalah organisasi lokal muda yang dipimpin oleh perempuan didirikan oleh Saba dan Gulalai Ismail di Pakistan. Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perdamaian di Pakistan. Mereka berupaya memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan muda, memungkinkan mereka bertindak sebagai agen perubahan sosial dan pemberdayaan perempuan di komunitas mereka.

Malala Fund dan *Aware Girls* telah berkolaborasi sejak awal aktivisme Malala Yousafzai. *Aware Girls* adalah organisasi Pakistan yang didirikan

oleh Gulalai Ismail dan saudara perempuannya Saba Ismail pada tahun 2002. Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan perempuan muda melalui program pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Malala bergabung dengan *Aware Girls* pada tahun 2011 dan menjadi anggota organisasi tersebut, berpartisipasi dalam berbagai program dan memajukan pendidikan bagi perempuan (IANSAs.org)

Kolaborasi antara Malala Fund dan *Aware Girls* mulai aktif pada tahun 2013, sejak didirikannya organisasi Malala Fund di tahun tersebut, kolaborasi ini menjadi keuntungan bagi Malala Fund karena menjadi mitra utama *Aware Girls* dalam upaya untuk mempromosikan pendidikan anak perempuan di Pakistan. Malala Fund memberikan dukungan finansial seperti meningkatkan pendanaan untuk perempuan terpinggirkan di Pakistan dalam menempuh pendidikan gratis (Shubha dan Patel 2015).

Hasil kolaborasi antara *Aware Girls* dan Malala Fund memberikan dampak signifikan bagi pendidikan perempuan di Pakistan. Melalui upaya bersama, yakni:

- a. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan muda: *Aware Girls* telah mampu memberdayakan perempuan dan anak perempuan muda melalui program pendidikan dan pengembangan kepemimpinan, memungkinkan mereka menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Pada pemberdayaan ini dapat berupa program lokakarya dan seminar, program ini dinamai dengan *Youth Peace Network* yang bertujuan untuk

mendidik perempuan dalam melawan ekstremisme (Impactmania 2013). Hal ini dilakukan oleh sekelompok pemuda lokal untuk menjangkau generasi muda di Pakistan.

- b. Mempromosikan pendidikan anak perempuan: Kolaborasi ini telah membantu mempromosikan pendidikan anak perempuan di Pakistan, khususnya di daerah dimana pendidikan anak perempuan terbatas atau tidak ada sama sekali. Dari kedua organisasi secara aktif menyuarakan dan memberdayakan pendidikan perempuan di Pakistan di berbagai *platform* seperti website resmi, termasuk di PBB. Dimana pada saat itu pada tahun 2013 Malala Fund berpidato menyuarakan pendidikan perempuan di Pakistan. Di tahun 2015 Saba Ismail menjadi moderator di panel perempuan PBB tentang perdamaian dan keamanan bagi perempuan di Pakistan di New York, dimana Saba memberikan suara mengenai pentingnya melibatkan perempuan dalam upaya pembangunan perdamaian (UN Women 2015).
- c. Mendukung pendidikan bagi anak perempuan yang terpinggirkan: Malala Fund telah mendukung *Aware Girls* dalam upaya mereka memberikan pendidikan kepada anak perempuan yang terpinggirkan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan mereka yang tinggal di daerah yang terkena dampak konflik. Dimana adanya guru yang terlatih dalam mengajarkan arti dari kesetaraan gender, pemberian beasiswa bagi perempuan yang kurang mampu

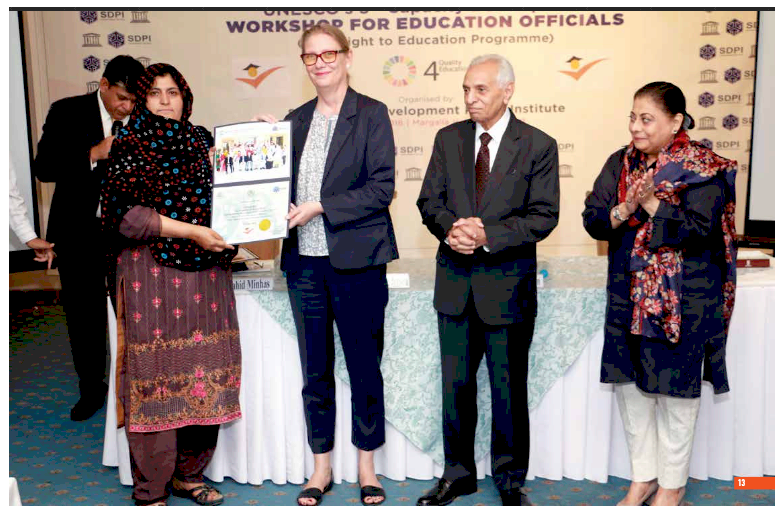
dalam menempuh pendidikan dan menyediakan infrastruktur yang memadai seperti toilet yang layak dan bersih (Impactmania 2013).

Hasil diatas terbentuk untuk mengatasi hambatan terhadap pendidikan anak perempuan di Pakistan, seperti kurangnya sekolah gratis dan berkualitas, kelangkaan pendidikan yang mempersiapkan anak perempuan untuk memasuki dunia kerja, dan norma-norma sosial yang melanggengkan stereotip gender. Bahwa kolaborasi antara Malala Fund dan *Aware Girl* merupakan bagian dari ‘mitra gerakan kampanye’ untuk mempromosikan pendidikan anak perempuan dan pemberdayaan perempuan di Pakistan. Pemerintah Pakistan, donor internasional, dan organisasi lokal lain juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya ini. Secara keseluruhan, kolaborasi ini berperan penting dan berkontribusi secara nyata dalam mempromosikan pendidikan anak perempuan di Pakistan, memberdayakan perempuan muda, dan memberikan perubahan dalam mendukung pendidikan anak perempuan. Hasil dari kolaborasi mereka sangat signifikan, dan upaya bersama mereka telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan ribuan anak perempuan dan perempuan di Pakistan (Malala Fund | Education Girl).

Tidak hanya dengan *Aware Girls*, Malala Fund turut dalam mendapatkan bantuan program oleh UNESCO. Pada tanggal 10 Desember 2012, UNESCO dan Pemerintah Pakistan secara resmi meluncurkan program layanan untuk Malala Fund, yang bertujuan untuk membantu

memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Acara ini diadakan sebagai bagian dari perayaan ‘Hari Hak Asasi Manusia’ dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan perempuan. Kemudian pada tahun 2015, Direktur jenderal UNESCO Irina Bokova dan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mendedikasikan dan memberikan momentum baru dalam acara membela Malala Fund untuk pendidikan perempuan dan anak-anak serta turut menyumbangkan dana pertama sebesar \$10 juta, yang dimana \$7 juta dialokasikan ke UNESCO untuk pelaksanaan program tersebut selama empat tahun (UNESDOC 2017).

Gambar 3.1 Kolaborasi Pemerintah untuk Program Hak Anak Perempuan Atas Pendidikan di Pakistan



Sumber: UNESCO 2018

Dalam kerjasama ini menjadi salah satu tujuan utama pengembangan kapasitas pejabat pendidikan untuk dapat memfasilitasi pembelajaran di sekolah melalui pelatihan manajemen sekolah yang efektif, seperti halnya dalam pelatihan khusus untuk para guru dalam pengembangan kapasitas pada teknik pembelajaran berbasis aktivitas. Tidak hanya itu, program pengembangan ini juga mendirikan sudut membaca untuk meningkatkan kebiasaan membaca di kalangan anak perempuan, meliputi buku cerita, dan materi pembelajaran agar menjadi keaktifan para siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler serta sekolah binaan. Keterlibatan masyarakat dan komite manajemen sekolah ditujukan agar dalam urusan sekolah dan kelancaran implementasi kebijakan serta program pendidikan di tingkat kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan anak perempuan. Pengembangan kapasitas pejabat pendidikan dirancang untuk memastikan bahwa mereka terlibat penuh dalam pelaksanaan program dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah (UNESCO 2018).

Dalam perjanjian *UNESCO Malala Fund for Girls Right to Education* yang diluncurkan oleh UNESCO dan Pemerintah Pakistan pada acara tingkat tinggi pada bulan Desember 2012. Pada bulan Februari 2014, Pemerintah Pakistan dan UNESCO menandatangani perjanjian kerangka kerja mengenai Hak *Malala Funds-In-Trust for Girls* untuk pendidikan dalam mendukung implementasi program holistik yang bertujuan untuk:

- a. Memperluas akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan, terutama mereka yang paling sulit dijangkau dan terkena dampak konflik dan bencana
- b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, memastikan bahwa konten, praktik pengajaran, pembelajaran proses dan lingkungan bersifat sensitif gender.
- c. Memperkuat kebijakan dan kapasitas untuk memastikan lingkungan pembelajaran yang aman (UNESCO 2014).

Kemudian pada bulan Juli 2015, program ini dilaksanakan melalui sembilan proyek sejenis di tingkat provinsi dan wilayah di distrik-distrik terpilih di empat provinsi (Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab dan Sindh), dan empat wilayah federal Kashmir yang Diperintah Pakistan, Wilayah Kesukuan Federal - FATA, Gilgit -Baltistan dan wilayah Ibu Kota Islamabad- ICT). Proyek-proyek ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi anak perempuan di sekolah dasar di komunitas marginal melalui mobilisasi komunitas lokal dan advokasi.
- b. Meningkatkan retensi dan kualitas pendidikan dasar anak perempuan di komunitas marginal melalui perbaikan di sekolah fisik dan lingkungan belajar.

- c. Meningkatkan kapasitas pejabat pendidikan provinsi dan kabupaten untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung (UNESCO 2018).

Semua proyek dilaksanakan melalui *Civil Society Organizations* (CSOs) lokal (UNESCO 2018). Dimana *Civil Society Organizations* CSOs ini ditujukan untuk Malala Fund sebagai mitra pelaksana dengan melakukan konsultasi kepada departemen pendidikan nasional, provinsi, dan daerah. Program ini mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengubah persepsi orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan anak perempuan di Pakistan.

Layanan program dukungan yang diberikan oleh UNESCO ini menjadi salah satu bentuk strategi Malala Fund sebagai NGO dalam memberikan penyampaian layanan. Implementasi program ini telah mencapai keberhasilan dan juga telah melewati banyaknya tantangan. Namun UNESCO juga perlu untuk memposisikan upayanya secara lebih jelas dalam mendukung pendidikan perempuan untuk memastikan keberlanjutan lebih baik untuk mengkonsolidasikan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antara berbagai intervensi dalam mencapai sinergi dan meningkatkan pembelajarn organisasi (UNESCO 2017).

3.2 Strategi *Malala Fund* sebagai Penyedia Pendidikan

Pada implementasi strategi Malala Fund dalam memajukan hak pendidikan perempuan yakni sebagai penyedia pendidikan. Salah satu strategi yang dikemukakan oleh Stromquist 2002 yakni *Educational Provision*. Dalam upaya strategi ini berperan dalam meningkatkan akses pendidikan melalui program-program pendidikan, memperoleh hibah dan memberikan bantuan dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan (Stormquist, 2002).

Melalui strategi tersebut dijelaskan bahwa Malala Fund memiliki keyakinan nyata dalam perubahan pendidikan perempuan. Hal ini menekankan sebagai organisasi penyelenggara pendidikan bahwa pentingnya memberikan investasi pada aktivis pendidikan lokal untuk menciptakan perubahan jangka panjang bagi anak perempuan di Pakistan. Sehingga diantaranya penjelasan dibawah ini merupakan bentuk strategi Malala Fund melakukan penyedia pendidikan bagi perempuan, yakni diantaranya peran Malala Fund dalam menyediakan pendidikan bagi perempuan di Pakistan, pemberdayaan yang dilakukan Malala Fund melalui dukungan finansial bagi perempuan di Pakistan dan program dukungan Malala Fund untuk para aktivis perempuan melalui *Education Champion Network*.

3.2.1 Peran Malala Fund dalam Menyediakan Pendidikan bagi Perempuan di Pakistan

Malala Fund memiliki peran yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan perempuan terutama melalui hibah, mendukung organisasi NGO lokal lainnya dan menyalurkan aksi kolektifnya untuk mengurangi hambatan yang menghalangi anak perempuan mengakses pendidikan. Malala Fund menyediakan berbagai layanan dan inisiatif untuk mendukung misinya, yakni sebagai berikut:

- a. Mendukung tokoh pendidikan lokal: Organisasi ini mendukung tokoh pendidikan lokal yang berupaya memajukan pendidikan menengah anak perempuan di komunitas mereka. Seperti halnya para aktivis pendidikan pada *Education Champion Network* diantaranya ada Shawana Shah, Umme Kalsoom Seyal, Partab Rai Shivani, Mariam Amjad Khan dan Madiha. Para pejuang pendidikan tersebut merupakan jaringan para aktivis pendidik lokal yang didukung oleh Malala Fund dalam tujuan untuk mengatasi hambatan pendidikan perempuan (Malala Fund | Champions)
- b. Menyalurkan aksi kolektif: Malala Fund menyalurkan aksi kolektif untuk menjadikan pendidikan anak perempuan sebagai prioritas. Fokus Malala Fund dalam memprioritaskan pendidikan diantaranya mengubah norma sosial untuk dapat mewujudkan perempuan bersekolah selama 12 tahun, meningkatkan pendanaan pendidikan untuk menyerukan

pemerintah untuk memastikan mendukung pendidikan perempuan di Pakistan, dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender serta ketahanan perempuan di setiap guncangan konflik yang ada (Malala Fund | Advocacy). Dengan menggabungkan kemitraan, pengaruh kebijakan, investasi, dan berbagi pengetahuan, Malala Fund bertujuan untuk menciptakan perubahan sistemik dan memberdayakan anak perempuan untuk mengakses pendidikan berkualitas. (“About | Malala Fund”).

Tujuan Malala Fund dalam menyediakan pendidikan tersebut yakni untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi anak perempuan mengakses pendidikan berkualitas, termasuk kurangnya pendanaan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, serta hambatan budaya dan sosial.

3.2.2 Malala Fund Memberdayakan Pendidikan Perempuan di Pakistan melalui Dukungan Finansial

Sebagai penyedia pendidikan Malala Fund berupaya menjadi NGO untuk memastikan bahwa perempuan maupun anak-anak dapat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan berkesempatan untuk mencapai potensi yang mereka miliki. Malala Fund memperluas jaringannya dalam menyebar luaskan tindakannya sebagai penyedia pendidikan dengan melakukan berbagai investasi untuk memberikan bantuan kepada aktivis maupun organisasi lokal dan mendukung proyek dalam menyediakan

pendidikan bagi perempuan di wilayah yang mengalami kesulitan dalam hal pendidikan (Gordon, 2015). Malala Fund menjalankan program pemberian hibah untuk mendukung upaya menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak perempuan. Dana tersebut mendukung inisiatif yang mengatasi hambatan pendidikan, seperti pernikahan dini, kurangnya akses terhadap fasilitas sekolah, dan tanggung jawab pengasuhan anak. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan anak perempuan untuk bersuara dan menuntut perubahan.

Dalam hal ini, beberapa tindakan atau aksi Malala Fund sebagai penyedia pendidikan dalam menerima dan membantu pendidikan perempuan pada periode 2013-2015 meliputi:

- a) Pada tahun 2013, organisasi Malala Fund menerima sumbangan pribadi sebesar USD 200.00 dari Angelina Jolie, yang digunakan untuk membangun sekolah dan mendanai pendidikan anak perempuan di Lembah Swat Pakistan. Upaya ini membantu memastikan bahwa perempuan di Lembah Swat dapat melanjutkan pendidikan mereka di lingkungan yang aman dan mendukung (Zuberi 2013).
- b) Di tahun 2014, Malala Yousafzai dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian di Inggris di saat aksinya yang berani dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan. Pada saat Yousafzai sedang menempuh pendidikan pada jurusan filsafat, politik dan ekonomi di Universitas Oxford, Inggris. Sejak meraih penghargaan tersebut Malala

Fund menginvestasikan \$47 juta dolar pada program pendidikan di Pakistan. Hal ini berfokus untuk pendidikan berkualitas, peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah pedesaan, dan inklusi digital yang lebih luas (Joshua 2014). Seperti halnya, Malala Fund menyediakan perlengkapan sekolah baik buku maupun seragam dan pendidikan lanjutan bagi anak perempuan di sekolah dasar, menengah, dan atas yang mengungsi akibat konflik dan banjir yang terjadi di Waziristan Utara bertepatan di Kyber Pakhtunkhwa Pakistan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak perempuan di Pakistan (Palais 2016).

- c) Seiring dengan berjalannya waktu, di tahun 2015, Malala Fund berupaya untuk terus meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan 12 tahun melalui mitra Malala Fund di kota-kota seperti Lahore dan Karachi, serta daerah pedesaan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Punjab dan Sindh, bentuk dari kemitraan tersebut berupa mengatasi hambatan perempuan untuk bersekolah dan meningkatkan pendanaan pemerintah untuk pendidikan perempuan. Peningkatan tersebut dapat berupa hibah, sumbangan swasta, dan alokasi anggaran. Melalui sumber daya keuangan inilah sistem pendidikan dapat diperkuat, dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan 12 tahun (Malala Fund | NewsRoom 2015).

Dalam hal ini, Malala Fund telah memberikan dukungan finansial bagi pendidikan perempuan di Pakistan, melalui berbagai inisiatif termasuk pada menerima dan menghibahkan kembali untuk kepentingan pendidikan perempuan di Pakistan.

3.2.3 Peran Malala Fund dalam mendukung Program melalui *Education Champion Network*

Melalui *Education Champion Network*, Malala Fund mendukung para aktivis pejuang pendidikan yang bertujuan untuk menentang kebijakan dan praktik yang menghalangi anak perempuan untuk bersekolah di komunitas mereka. Meskipun *Education Champion Network* resmi berdiri pada tahun 2017, Malala Fund sebagai NGO penyelenggara pendidikan telah bergerak untuk mendukung program ini sejak didirikan pada tahun 2013. Malala Fund berinvestasi dalam pekerjaan mereka, mendukung pengembangan profesional mereka dan menghubungkan mereka satu sama lain untuk mengembangkan jaringan nasional, regional dan global. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif dari para pejuang pendidikan, Malala Fund menciptakan perubahan yang lebih luas dan mempermudah semua anak perempuan untuk belajar (Malala Champion 2019).

Terinspirasi oleh akar Malala dan Ziauddin Yousafzai sebagai aktivis lokal di Pakistan, Malala Fund mendirikan *Education Champion Network* untuk mengidentifikasi, berinvestasi, dan meningkatkan upaya pendidik

lokal yang menjanjikan. Melalui hibah, *Education Champion* melaksanakan proyek-proyek ambisius dan berpartisipasi dalam aksi kampanye untuk mengubah kebijakan lokal dan nasional yang menghambat akses anak perempuan terhadap pendidikan. Malala Fund mendukung para aktivis pendidikan di beberapa negara berkembang diantaranya Pakistan, Afghanistan, Brazil, Ethiopia, India, Lebanon, Nigeria, dan Turki untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi. Malala Fund menginvestasikan \$7,8 juta dolar dalam program dan kampanye *Education Champion Network* untuk beberapa tahun ke depan, dari tahun 2023 hingga 2025 (Malala Champion 2019).

Salah satu *Gulmakai Champion* yang berasal dari Pakistan Zehra Arshad mewakili Malala Fund untuk membantu dalam mengurangi hal ketidakadilan yang telah terjadi pada sistem pendidikan di Pakistan khususnya dalam hal diskriminasi. Sebagai direktur eksekutif Koalisi *Pakistan for Education* (PCE) dan Malala Fund Education Champion, Zehra menyuarakan amandemen konstitusi. Pakistan yang akan meningkatkan persyaratan nasional untuk pendidikan gratis, berkualitas, dan adil dari 10 menjadi 12 tahun di Pakistan. Untuk mendukung kampanye tersebut, PCE mengumpulkan bukti statistik mengenai kesenjangan gender dalam pendidikan, menjalin hubungan dengan para pembuat kebijakan, melakukan penjangkauan media dan melatih

perempuan muda untuk bersuara dalam mendukung amandemen tersebut (Malala Foundation 2019).

Pejuang pendidikan Malala Fund Zehra Arshad, Direktur Eksekutif Koalisi pendidikan Pakistan, menyambut baik laporan tersebut dan menyerukan kepada pemerintah untuk menargetkan anak-anak perempuan yang putus sekolah dalam rencana tanggapnya: "Ini keadaan darurat harus diikuti dengan tindakan ekstensif dan rencana aksi inklusif di semua tingkat pemerintahan. Setiap keadaan darurat dan tinjauan kebijakan selanjutnya harus mencakup fokus khusus pada anak perempuan (Johnston 2018)."

Gambar 3.2.1 Aktivist Gulmakai Network Zehra Arshad



Sumber: Gulmakai Champion Interview, 2018

Laporan ini mencerminkan peningkatan kepedulian masyarakat dan politik terhadap pendidikan perempuan di Pakistan. Penting bagi pejabat federal untuk mengikuti rekomendasi laporan tersebut dan menyatakan pendidikan dalam keadaan darurat dengan investasi yang berarti dan rencana implementasi yang berbiaya tinggi. Dengan berkomitmen dan

berinvestasi pada pendidikan perempuan di tingkat nasional, pemerintah Pakistan dapat membantu menciptakan dunia di mana setiap anak perempuan dapat memilih masa depannya (Johnston 2018).

Pada *Education Champion Network* Malala Fund telah membuat kemajuan signifikan dalam memajukan pendidikan anak perempuan dan memberdayakan para pendidik dan organisasi lokal. Melalui program dan inisiatifnya, Malala Fund telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua anak perempuan memiliki akses terhadap pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun.

3.3. Strategi Malala Fund dalam Memberikan Advokasi Kebijakan Publik

Melalui dua penjelasan strategi diatas, bahwa dengan bantuan berjalannya tindakan antara memberikan penyampaian layanan dan penyedia pendidikan bahwasannya memerlukan adanya advokasi kebijakan publik, dimana hal tersebut sebagai tujuan untuk mendukung pendidikan anak perempuan dan turut berkontribusi dalam melakukan beberapa kampanye dalam mendorong perubahan kebijakan oleh Pemerintah (Stromquist, 2002). Melalui tindakan yang dilakukan Malala Fund telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik di Pakistan. Hal ini terbukti bahwa tindakan yang dilakukan Malala Fund sebagai NGO dalam menganalisis isu kebijakan dengan cara menyuarakan hak pendidikan perempuan dalam berbagai cara, guna mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat, organisasi global maupun lokal.

3.3.1 Malala Fund dalam Menyuarakan Pendidikan Perempuan di Pakistan

Malala Fund melakukan beberapa hal dalam menyuarakan hak pendidikan perempuan seperti melalui pidato, berkampanye dan aktif dalam sosial media yang memiliki visi misi sama dengan Malala Fund untuk membantu perempuan mendapatkan hak pendidikan. Melalui aksi yang dilakukan Malala Yousafzai sebagai pendiri organisasi Malala Fund ia berpidato untuk menyampaikan aksinya agar dapat di dengar oleh negara. Pada tahun 2013 debut pidato Malala dilakukan di PBB sekaligus menjadi utusan perdamaian termuda yang dipilih oleh PBB. Pidato ini dilakukan untuk mengadvokasi pendidikan perempuan. Dalam pidatonya menekankan pentingnya pendidikan untuk menciptakan masa depan yang aman dan berkelanjutan bagi semua anak perempuan. (Martens 2013).

Gambar 3.3.1 Pidato Malala Fund di PBB



Sumber: Newsroom Website Malala Fund 2013 di akses 6 Mei 2024

Terlihat pada gambar diatas Malala Yousafzai menyampaikan pidato ulang tahunnya yang ke-16 di PBB pada 12 Juli 2013. Dalam pidatonya, ia

menekankan pentingnya pendidikan dan perlunya perjuangan global melawan buta huruf, kemiskinan, dan terorisme. Ia menyoroti perjuangan yang dihadapi oleh anak perempuan dan perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk Pakistan. Di mana mereka tidak diberi akses terhadap pendidikan dan menjadi sasaran kekerasan, pekerja anak, dan pernikahan dini. Malala menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa semua anak, terutama anak perempuan, mempunyai akses terhadap pendidikan gratis dan wajib. Dia mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dan hak anak-anak dalam perjanjian damai dan memerangi terorisme dan kekerasan. Malala juga menekankan perlunya toleransi dan penolakan prasangka berdasarkan kasta, keyakinan, sekte, agama, atau gender untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan (Malala 2013).

Malala menyoroti tantangan yang dihadapi anak perempuan dalam mengakses pendidikan, seperti larangan pada pendidikan anak perempuan dan dampak konflik kekerasan terhadap pendidikan anak perempuan di Pakistan. Malala mendesak para pemimpin untuk berkomitmen menjunjung tinggi hak untuk menyelesaikan pendidikan dan menyerukan para pemimpin dunia untuk serius terhadap pendidikan serta membantu untuk mengalokasikan 20% anggaran mereka untuk pendidikan, bekerja sama untuk mentransformasikan pendidikan (Martens 2013)

Tidak hanya keaktifannya dalam melakukan pidato untuk menyuarakan hak pendidikan perempuan, di tahun 2015 terdapat kampanye *#GirlsCount* yang diluncurkan oleh organisasi advokasi internasional yakni *ONE Campaign*, yang bertujuan untuk menyoroti krisis pendidikan khususnya bagi anak perempuan di beberapa negara berkembang seperti di Pakistan. Dengan kampanye ini menggambarkan bahwa permasalahan yang terjadi mengenai pendidikan anak-anak dan perempuan akan sangat berpengaruh terhadap mereka. *ONE Campaign* memperkirakan bahwa biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah hanya berkisar \$1,57 per hari (Bond 2017). Kampanye juga telah didukung oleh aktivis perempuan yakni Malala Yousafzai, tidak lain bahwa ia juga aktif membawa Malala Fund untuk aktif mempromosikan pendidikan anak salah satunya dalam *Education Champaign Network* (Bond 2017).

Gambar 3.3. 2Gerakan Kampanye #GirlsCount



Sumber: *One Champaign* Meagan Bond, 2017

Malala Fund menganggap bahwa kampanye *#GirlsCount* merupakan salah satu kampanye yang dilakukan Malala Fund melalui media sosial.

Dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesadaran mengenai 130 juta anak perempuan di seluruh dunia yang tidak bersekolah dan mendorong masyarakat untuk mendukung pendidikan anak perempuan. Tidak lain merupakan salah satu misi Malala Fund untuk memastikan setiap perempuan dan anak-anak untuk berkesempatan untuk bersekolah dan mencapai mimpinya. Bentuk kampanye ini dilakukan melalui *platform* media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk berbagi cerita statistik dan ajakan untuk bertindak serta mendorong orang untuk memberikan donasi sebagaimana mendukung dari adanya kampanye tersebut. Kampanye *#GirlsCount* juga menjadi bagian dari upaya pemasaran digital dan sosial Malala Fund yang lebih besar, yang mencakup publikasi digital, buletin Majelis, dan penggunaan platform digital untuk berinteraksi dengan para pendukung dan berbagi informasi terkini tentang pekerjaan organisasi (Saracco 2017).

Malala Fund juga turut aktif dalam media sosialnya seperti *Twitter*, *Instagram*, dan *Tiktok*. Upaya ini menjadi salah satu tindakan Malala Fund dalam memberikan unggahan berisi bentuk kegiatan dan kinerja yang dilakukan Malala Fund. Organisasi Malala Fund memanfaatkan *platform* ini untuk berbagi cerita, statistik, dan pengalaman pribadi yang menyoroti tantangan dan keberhasilan anak perempuan dan perempuan dalam mengejar pendidikan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak perempuan dan hambatan yang

dihadapi anak perempuan dan perempuan dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Gambar 3.3.3 Akun Resmi Twitter Instagram dan Tiktok Malala Fund



Sumber: Website, Official Akun *Twitter*, *Instagram* dan *Tiktok* Malala Fund

Terlihat pada setiap akun sosial media Malala Fund mulai berjalan di tahun 2013, pada setiap bio akun menuliskan mengenai “Malala Fund bekerja untuk dunia di mana semua anak perempuan dapat belajar dan memimpin tanpa rasa takut”. Pada situs website resmi Malala Fund menerbitkan *platform* publikasi digital yang bertujuan untuk membagi cerita, dan website resmi ini juga menyediakan pembaruan berita terbaru mengenai aktivitas, serta capaian Malala Fund dalam mempromosikan pendidikan. Salah satu aktivitas tersebut mengenai program Malala Fund,

termasuk *Gulmakai Network*, yang memberdayakan tokoh dan aktivis lokal untuk mengadvokasi pendidikan anak perempuan pada komunitas Malala Fund (Malala.org | Youth Action). Pada akun twitter sendiri Malala Fund cenderung membagikan kampanye seperti *#WithMalala* merupakan dari kampanye dalam mendukung perjuangan Malala Yousafzai demi pendidikan perempuan. Sedangkan pada akun Instagram dan Tiktok Malala Fund membagikan *Faces and Stories* berupa video pendek yang bertujuan untuk menyoroti pentingnya pendidikan perempuan (Jagruti Verma 2020).

Dalam mengadvokasi kebijakan pendidikan, Upaya Malala Fund yang tak kenal lelah untuk memperkuat suara pendidikan perempuan melalui pidato di PBB, kampanye, dan keterlibatan aktif di media sosial telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran global dan tindakan yang menginspirasi.

3.3.2 Upaya Pemerintah Pakistan dalam Membantu Malala Fund untuk Mengadvokasi Perubahan Pendidikan bagi Perempuan

Sejak berdirinya Malala Fund di tahun 2013, pemerintah Pakistan telah menjalin kolaborasi dengan Malala Fund seperti halnya dengan organisasi ternama sebelumnya, bahwa mereka saling mempromosikan pendidikan perempuan baik dalam metode pengajaran dan kurikulum. Dari Aksi advokasi

Malala Fund baik dalam kampanye maupun aktif dalam media sosial menjadikan pemerintah turut dalam membantu Malala Fund menyuarkan hak Pendidikan perempuan di Pakistan. Hal ini terbukti kolaborasi nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Pakistan dengan Malala Fund yakni dengan membuat sebuah strategi inisiatif yang disebut dengan *STEAM Education for Girls* yang bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan anak perempuan terhadap Pendidikan Sains, Teknologi, Teknik, Seni dan Matematika (STEAM) (Malala Fund | Newsroom 2022).

Malala Fund telah terlibat dalam inisiatif pendidikan STEAM sejak tahun 2014. Organisasi ini telah menginvestasikan lebih dari \$7,5 juta pada organisasi lokal di seluruh Pakistan, dengan fokus pada advokasi pendidikan berkualitas, peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah pedesaan, dan inklusi digital yang lebih luas. Rencana strategis Malala Fund untuk tahun 2020-2025 menguraikan komitmennya untuk memperluas pekerjaannya di bidang pendidikan STEAM, khususnya di Pakistan, yang tidak lain pada program ini bertujuan untuk menjangkau 13.000 sekolah menengah negeri dalam memberikan manfaat bagi seluruh siswa dengan fokus pada peningkatan akses dan hak pilihan perempuan dalam menempuh Pendidikan (Malala Fund | Newsroom 2022).

Gambar 3.3.4 Peresmian Komitmen Jangka Panjang Malala Fund terhadap Anak Perempuan di Pakistan



Sumber: Malala Fund | NewsRoom 2022

Pada gambar diatas merupakan peresmian komitmen untuk memajukan akses anak perempuan usia sekolah menengah terhadap sains, teknologi, teknik, pendidikan seni dan matematika (STEAM) yang dilakukan oleh staf Malala Fund Javed Ahmed Malik yakni sebagai Direktur Program, Pakistan dan Maliha Khan sebagai anggota Kementerian Pendidikan Federal dan Pelatihan Profesional (*Chief Programs Officer* (Malala Fund | Newsroom 2022). Hal in menjadi pengaruh bagi pendidikan STEAM dari Malala Fund sebagai NGO dalam peningkatas akses pendidikan bagi perempuan di Pakistan.

Pemerintah Pakistan berupaya untuk memperbaiki status perempuan di masyarakat dan memberdayakan mereka untuk dapat menjalani kehidupan dengan cara yang relatif lebih baik. Hal ini tidak menjadikan perempuan untuk

tidak terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis dan berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan bagi negara (Mustafa 2016).

Untuk tujuan ini, pemerintah telah merencanakan untuk mengambil banyak tindakan perbaikan yang mencakup hal-hal penting berikut ini

- a. Di semua lembaga sektor publik dan swasta, program pelatihan kesetaraan gender akan dilakukan serta penghormatan dan pemberian hak yang setara kepada perempuan akan dimasukkan dalam kode etik organisasi.
- b. Direncanakan untuk memastikan bahwa tidak ada lobi yang dilakukan terhadap hak-hak perempuan.
- c. Pemerintah juga akan meluncurkan kampanye media untuk menyadarkan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan bahwa mereka harus diperlakukan setara (Mustafa, Sadiq, Khan, Jameel 2016).

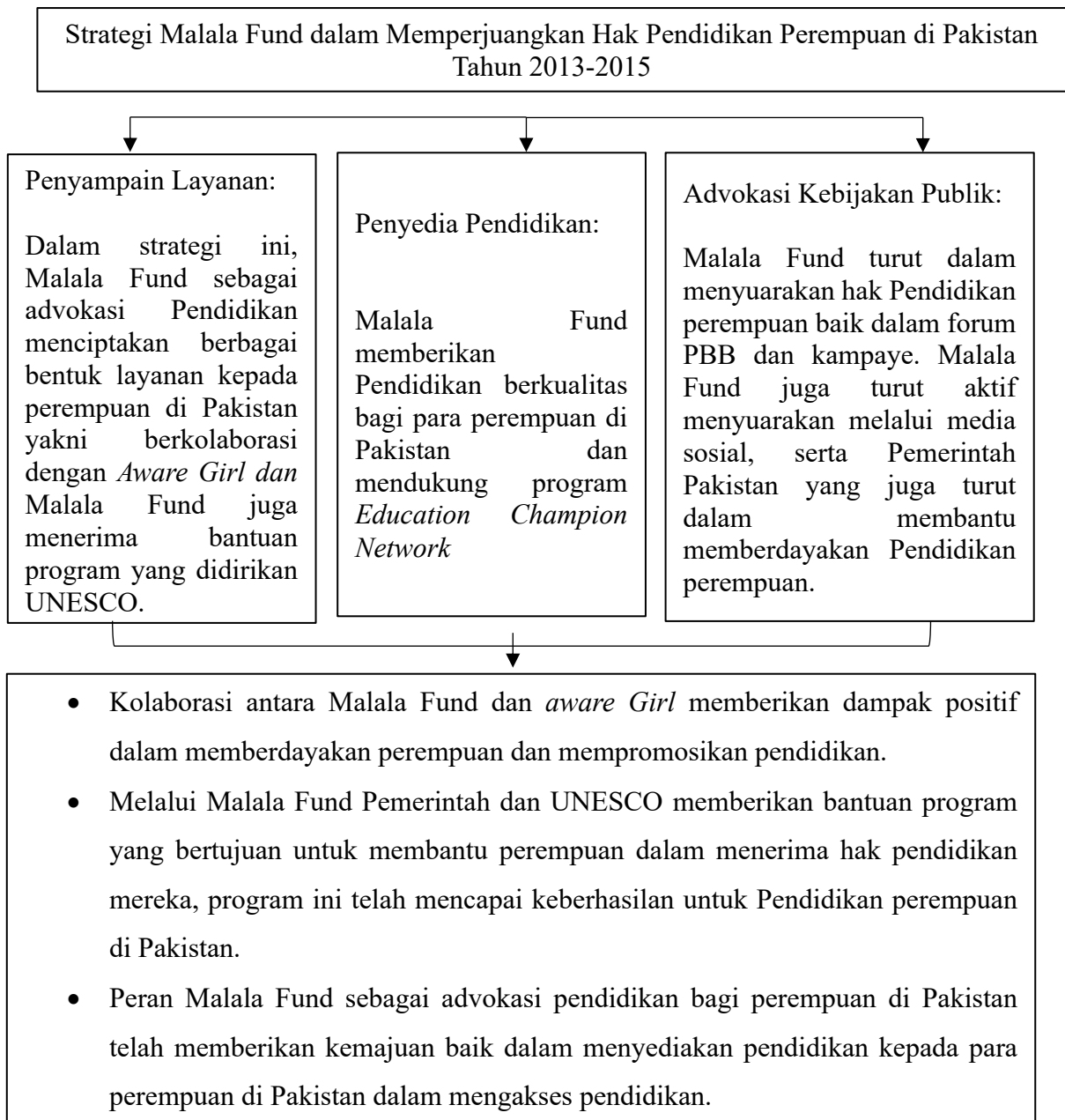
Hal ini menjadikan Malala Fund untuk memiliki rencana ambisius untuk di masa yang akan datang. Dimana Malala Fund akan mengadvokasi pemerintah untuk menyediakan lebih banyak dana untuk pendidikan, kampanye untuk mengubah norma-norma sosial itu menyangkal potensi anak perempuan dan mengupayakan pendidikan berkualitas mempersiapkan para perempuan untuk membentuk dunia di sekitar mereka (Lei dan Royale 2020).

Tidak hanya itu, Pemerintah Pakistan juga turut mendapatkan dorongan dari Kementerian Perencanaan, Pembangunan dan Reformasi dan Pembangunan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Pakistan. Mereka menandatangani perjanjian pada tanggal 4 Maret 2015, senilai US\$ 11,6 juta dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk mendukung implementasi reformasi tata kelola pemerintah di tingkat federal dan provinsi di Pakistan (Inayet 2015). UNDP menyumbang US\$ 7 juta, dan Pemerintah Pakistan menyumbang US\$ 4,66 juta (Inayet 2015). Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas kemampuan dan akuntabilitas sektor publik, meningkatkan efektivitas komisi untuk menyelenggarakan, menganalisis, mengusulkan, dan mendukung pelaksanaan reformasi utama tertentu, termasuk pemantauan dan evaluasi pembangunan. program, pemantauan kemiskinan dan kesenjangan, dan modernisasi struktur negara (Inayet 2015). Implementasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas lembaga publik di Pakistan.

Sehingga Malala Fund akan terus berjuang untuk meningkatkan investasi pada orang-orang penting dalam perjuangannya yakni sebagai advokat lokal, pendidik dan anak perempuan yang membutuhkan keadilan. Malala Fund telah menjadi tolak ukur pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan, dimana perubahan ini juga terjadi karena adanya tekanan internal atau eksternal di tingkat lokal, nasional dan global. Dengan demikian memunculkan adanya norma-norma sosial yang didukung oleh Malala Fund yang menghasilkan perubahan persepsi masyarakat dalam mendukung hak pendidikan perempuan.

Tabel 3.1 Tabel Temuan Penelitian dalam Penerapan Teori Strategi Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Pakistan Tahun 2013-2015



- Pada rentan tahun 2013-15, Malala Fund mendapat bantuan sejumlah USD 200.00 untuk pendidikan perempuan, Malala Fund juga berproses dalam pembangunan sekolah di wilayah Waziristan Utara, Malala Fund di tahun 2015 terus menjalankan peningkatan pada Pendidikan 12 tahun melalui beberapa kota dan desa pada provinsi Pakistan.
- Malala Fund melalui Education Champion Network (Gulmakai Network) juga telah berhasil meningkatkan pendidikan bagi perempuan dan telah banyak diikuti oleh aktivis.
- Melalui Malala Fund Zehra Arshad sebagai salah satu aktivis yang berhasil mengadvokasi amandemen konstitusi Pakistan yang meningkatkan persyaratan nasional untuk memastikan pendidikan gratis, aman dan berkualitas dari 10 tahun menjadi 12 tahun.
- Malala Fund membantu menyuarakan pendidikan perempuan melalui forum PBB, melakukan kampanye, aktif dalam media sosial dan website resmi serta adanya peran pemerintah dalam tindakan perbaikan untuk pendidikan perempuan di Pakistan.
- Malala Fund telah berhasil mendapatkan respons dari pemerintah dalam memberikan pemberdayaan pendidikan perempuan di Pakistan diantaranya membuat program *STEAM Education for Girls* untuk menjangkau 13.000 sekolah menengah negeri dalam memberikan manfaat bagi seluruh siswa dengan focus pada peningkatan akses dan hak pilihan perempuan dalam menempuh pendidikan. Kemudian di tahun 2015 Kementerian perencanaan pembangunan dan reformasi Pakistan telah memberikan dana senilai US\$ 11,6 juta dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk mendukung implementasi reformasi tata kelola pemerintah di tingkat federal dan provinsi. UNDP menyumbang US\$ 7 juta, dan Pemerintah Pakistan menyumbang US\$ 4,66 juta.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Malala Fund yang berusaha untuk meningkatkan kehidupan perempuan melalui pendidikan, tidak hanya untuk laki-laki namun pendidikan bagi perempuan juga berperan cukup penting dalam memajukan dan memberikan kemampuan untuk negara, Hal tersebut juga menjadi simbol atas perjuangan hak mereka sebagai perempuan dalam menempuh pendidikan.

Peran *Malala Fund* dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan dapat terbentuk dalam konsep *Empowerment Theory* yakni mengenal *NGO dalam paradigma baru bagi masyarakat sipil* yang dikemukakan oleh Stromquist 2002. Pendekatan ini bertujuan untuk mengulas mengenai kekuatan sosial yang kuat dan erat yang dimiliki oleh *Malala Fund* dalam proses perubahan yang lebih baik tentang hak perempuan di Pakistan. Serta bagaimana *Malala Fund* menjadi salah satu NGO yang membantu perempuan dan anak-anak dalam memenuhi kesejahteraan mereka. Pada konsep ini *Malala Fund* menggunakan tiga fungsi dari NGO melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan strategi pemberdayaan menurut Stromquist (2002) antara lain Strategi dalam membantu penyampaian layanan, sebagai penyedia pendidikan dan membantu dalam advokasi kebijakan publik.

Strategi dalam, membantu penyampaian layanan yang dilakukan Malala Fund yakni Malala Fund memberikan layanan program pendidikan bagi perempuan, melakukan kerjasama dan kolaborasi. Malala Fund sebagai perjuang hak pendidikan bagi perempuan telah memberikan pendidikan yang lebih baik bagi mereka. Kolaborasi Malala Fund dan *Aware Girls* berjalan untuk memperomosisikan pendidikan, memberdayakan perempuan dan memberikan perubahan dalam mendukung pendidikan perempuan. Kerjasama dengan UNESCO dilakukan untuk mendukung pendidikan perempuan di Pakistan, dengan adanya program perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dengan UNESCO untuk hak *Malala Funds-inTrust for Girls*. Program ini kemudian dikembangkan pada tingkat provinsi di beberapa distrik yang terpilih. Tidak hanya dengan UNESCO,

Strategi sebagai penyedia pendidikan, peran Malala Fund sebagai organisasi NGO telah memberikan pemberdayaan bagi pendidikan perempuan dalam mendukung tokoh lokal dan aktif dalam aksi kolektif, serta memberikan pendidikan yang berkualitas dalam dukungan finansial dengan menerima dan membantu perempuan untuk menempuh pendidikan. Malala Fund juga turut mengembangkan *Education Champion Network* untuk mengurangi ketidakadilan pendidikan perempuan di Pakistan. Zahra Arshad salah satu aktivis Gulmakai Champion yang mewakili Malala Fund dalam menyuarakan hak amandemen konstitusi persyaratan nasional dari 10 menjadi 12 tahun.

Strategi membantu dalam advokasi kebijakan publik, Malala Fund menyuarakan hak pendidikan bagi perempuan, yakni melalui forum PBB Malala

berpidato dengan membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Malala Fund juga turut mendukung berbagai kampanye mengenai pendidikan perempuan yakni *#GirlsScout* serta aktif dalam bersosial media seperti Website resmi, *Twitter*, *Instagram*, dan *Tiktok*. Malala Fund juga turut berupaya melobi pemerintah untuk melakukan tindakan perbaikan untuk pendidikan perempuan di Pakistan melalui pidato di PBB, kampanye, dan keterlibatan aktif di media sosial.

4.2 Rekomendasi

Penulis memiliki saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat mengembangkan tahun penelitian setelah 2015 karena melihat bahwa sampai saat ini Malala Fund tetap aktif menyuarakan isu pendidikan perempuan, termasuk masa pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, dan ditinjau kembali dengan melihat berbagai kerjasama yang dilakukan oleh *Malala Fund* dengan organisasi internasional lainnya, serta peran dan kebijakan oleh Pemerintah Pakistan mengenai isu pendidikan perempuan di Pakistan. Dalam penelitian selanjutnya, dapat juga mengembangkan penulisan melalui peran *Malala Fund* dalam bidang pendidikan di beberapa negara lainnya seperti Afghanistan, India, Lebanon, Nigeria, Brazil, Euthopia, Turkey, Kenya dan Sindh, dengan dapat ditinjau bahwa di tahun sekarang ini Malala Fund aktif di negara tersebut, serta analisis lebih lanjut tentang dampaknya terhadap akses pendidikan perempuan dan kesenjangan Pendidikan yang dialami oleh perempuan di Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

Website

- “About | Malala Fund.” n.d. Malala Fund. Accessed April 28, 2023.
<https://malala.org/about?sc=header>.
- “Malala's Story | Malala Fund.” n.d. Malala Fund. Accessed March 7, 2023.
<https://malala.org/malalas-story>.
- “Champions | Malala Fund.” n.d. Malala Fund. Accessed May 29 2024
<https://malala.org/champions>
- “Advocacy | Malala Fund.” n.d. Malala Fund. Accessed May 29 2024
<https://malala.org/advocacy>
- “Girls Education | Malala Fund.” n.d. Malala Fund. Accessed May 2024
<https://malala.org/girls-education>
- Barry Johnston 2018. “New Reports Recommend Education State of Emergency in Nigeria and Pakistan”. Malala Fund Newsroom. Accessed Maret 27, 2024
<https://malala.org/newsroom/education-state-emergency-nigeria-pakistan>
- “Education Champion Network 2019.” Malala Fund. Accessed Maret 27, 2024
<https://malala.org/champions/zehra-arshad>
- Fatima Inayet (2015). The Ministry of Planning, Development and Reforms and UNDP Collaborate to Promote Key Governance Reforms at Federal and Provincial levels. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(OCHA). Reliefweb. <https://reliefweb.int/report/pakistan/ministry-planning->
- Joshua Woo. 2014. “Malala’s Quiet Activism for Education and Peace”. *Vision Of Humanity*. Accessed 29 May 2024.
<https://www.visionofhumanity.org/malalas-quiet-activism-for-education-and-peace/>
- Meagan Bond 2017. “#GirlsCount: ONE’s new campaign for girls’ education”. *One Campaign*. Accessed <https://www.one.org/us/stories/girlscount/development-and-reforms-and-undp-collaborate-promote-key>
- “NewsRoom | Malala Fund. Reaffirming Malala Fund’s longterm Commitment to girls in Pakistan. Februari 2022. Accessed April 20, 2024
<https://malala.org/newsroom/reaffirming-malala-funds-long-term-commitment-to-girls-in-pakistan>

- “NewsRoom | Malala Fund 2013. Malala Yousafzai: 16th Birthday Speech at the United Nations. Accessed 6 Mei 2024. <https://malala.org/newsroom/malala-un-speech>
- “NewsRoom | Malala Fund 2015. Beyond Basics: Making 12 years a Reality. Accessed 7 Mei 2024 <https://malala.org/newsroom/beyond-basics>
- "Youth Action Campaign". Malala Fund. Accessed 29 May 2024 <https://malala.org/youth-action-campaign>

Artikel Jurnal

- Ahmad, I., Said, H., Hussain, A., & Khan, S. 2014. Barriers to Co-Education in Pakistan and Its Implications on Girls Education: Critical Review of Literature. *Science International*, 26(1).
- Alexandra Raphel 2014. “Women, girls and Malala: Research on gender and education in Pakistan, and beyond” *The Journalist’s Resources Economics, Politics & Government, Race & Gender*. Akses October 10, 2014. <https://journalistsresource.org/economics/pakistan-women-equalityeducation-economic-development-research-roundup/>
- Askari A, Jawed A & Askari S. 2022. “Women Education in Pakistan: Challenges and Opportunities.” *International Journal Women Empowerment* Vol.8 (1).
- Awan,A.G. and Kashif Saeed 2014 “Intellectual Capital and Research Performance of Universities in Southern Punjab-Pakistan” *European Journal of Business and Innovation Research*, Vol.2 No.6 pp 21-39
- Bano, S. 2009. “Women in Parliament in Pakistan: Problems and Potential Solutions”. *Women's Studies Journal* , 23 (1), 19-34.
- Batool, S.Q, Sajid, M.A and Shaheen. I. 2013. “Gender and Higher Education in Pakistan” *International Journal of Gender and Women’s Studies* 1(1):15-28
- Channar, A, Z., Abbassi, Z., & Ujan, A. I. 2011. “Gender Discrimination in workforce and its impact on the Employees.Pak.j”. *Commer. Soc. Sci.* Vol.5 (1), 177-191.
- Desai V. 2005. NGOs, gender mainstreaming, and urban poor communities in Mumbai. *Gender and Develop- ment* 13(2):90-98.
- Ejaz Ashraf, Mohammad Younis Afzal, and Hafiz Khurram Shurgeel 2015. “A REVIEW OF RURAL WOMEN EDUCATION IN PAKISTAN”. University College of Agriculture, University of Sargodha-Pakistan. (Lahore),27(1),555-559. <http://www.sciint.com/pdf/636342441891248520.pdf>
- Erini Gouleta 2014. “The Critical Issue of Girls' Education in Pakistan: Challenges and Promises”. *Associate Porfessor of International Education and ESL, George Mason University, Fairfax Virginia*
- Fazal N., and Ghazi S. 2018. “Women's Education in Pakistan: Barriers, Outcomes, and Impact on Poverty.” *Journal Internatonal Woman's Study* Vol 19 (2): 36-49.

- Farid et al. 2014. "Socio Economic Problems Faced by Rural Women in Getting Higher Education (A Case Study of District Karak)". *The International Asian Research Journal*, 2(4), 31-40.
- GOP. (2014). Finance Division , "Economic Survey of Pakistan 2013-14" Government of Pakistan. <http://www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk>.
- Hedayat Allah Nikkhah, and Ma'rof Bin Redzuan. 2010. "The Role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development." *Journal of Human Ecology* 30:2:85-92. DOI: 10.1080/09709274.2010.11906276.
- Huma Akram 2020. "Education Governance in Pakistan: A Critical Analysis of Challenges". *Journal of Sciences Advancement. School of Education, Northeast Normal University, China*. 1(1) 38-41
- Iqbal, S., Mohyuddin, A., Afzal, R., Ali, Q., & Naqvi, S. T. M. 2013. —Traditional Attitude Of Parents And Its Impact On Female Educational Attainment In Rural Hafizabad, Pakistan. *World Applied Science Journal*, Vol. 27 (1), Pp. 87-91.
- Luqman, M., Shahbaz, B., Ali, T., & Siddiqui, M. T. 2015. Gender disparity in education: Agricultural & Rural Development dilemma in the province of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Agriculture & Applied*
- Khan, Rida, Dr. Sheharyar Khan, and Muhammad Khan. 2020. "Impact of Socio-Cultural Factors on Women's Higher Education". *Pakistan Review of Social Sciences (PRSS)* 1(2):36-46.
- Malik, B. A., Amin, N. A., Mukhtar, E. M., Saleem, M. & Kakli, M. B. 2015, — Pakistan Education For All Review Report, Vol. 9(2), Pp. 89-101.
- Malik, R., Rose, P., 2015 "Financing Education in Pakistan: Opportunities for Action". Country Case Study for the Oslo Summit on Education for Development, PUBLISHER, pp.7-8 *Sciences*, 7(1), 72-77.
- Naz, A., Daraz, U., Khan, W., & Sheikh, I. 2013. Physical And Infrastructural Obstacles To Women's Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. *FWU Journal Of Social Sciences*, 7(2), 139-145.
- Nolan, B., Salverda, W., Checchi, D., Marx, I., McKnight, A., Tóth, I. G., & van de Werfhorst, H. G. 2014. "Changing Inequalities and Societal in Rich Countries: Thirty Countries". *Experiences: Oxford University Press*
- Norris, E., Kidson, M., Bouchal, P., & Rutter, J. 2014. "Doing Them Justice: Lessons from Four Cases of Policy Implementation", 19. *London: Institute for Government*
- Rehman, A., Jingdong, L., & Hussain, I. 2015. The province-wise literacy rate in Pakistan and its impact on the economy. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 1(3), 140- 144.
- Reynolds, Nathalie. 2019. "On Malala Yousafzai's Contribution to Improving the Situation of Pakistani Women." Edited by Sarah S. Aneel, Uzma T. Haroon, and Imrana Niazi." *70 YEARS OF DEVELOPMENT: THE WAY FORWARD. Sustainable Development Policy Institute*.

- Roseland M., 2000. *Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives* 54 (2):73-132.
- Sabir Muhammad. 2002. Gender and Public Spending on Education in Pakistan: A Case Study of Disaggregated Benefit Incidence. *The Pakistan Development Review* 41(4):477-493. DOI:10.30541/v41i4IIpp.477-493
- Sadaf Mustafa, M. Sadiq Ali Khan, Kiran Jameel. 2016. Women Education in Pakistan: Is The Level Enough for Empowerment?. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol 7 (8) 1751-1752.
- Samina & Kathy Malik & Courtney. 2011. "Higher education and women's empowerment in Pakistan." *Gender and Education* 23:1:29-45.
- Shamain Haque Mohiuddin (2019). "Gender and Education in Pakistan" INSTITUTE FOR POLICY REFORMS, No 111, 123-586
- Shaukat, S. and Pell, A.W. 2015. "Personal and social problems faced by women in higher education". *FWU Journal of Social Sciences*, 9(2), 101.
- Shubha Jayaram dan Sonaly Patel. 2015. "Financing Upper Secondary Education: Unlocking 12 Years of Education for All". *Development Institute, Commissioned by the Malala Fund*. Pp 1-4. https://www.r4d.org/wp-content/uploads/Financing-Upper-Secondary-Education_Unlocking-12-years.pdf
- Skalli, L. H. 2001. "Women and Poverty in Morocco: The Many Faces of Social Exclusion", *Feminist Review*, No. 69, pp. 73-89
- STREETEN, P. 1997. *Nongovernmental Organizations and Development*. 554(1):193-210. <https://doi.org/10.1177/0002716297554001012>
- Stromquist Nelly P. 2002. "NGOs in a New Paradigm of Civil Society." *Current Issues in Comparative Education* 1 (1): 62-63 <http://dx.doi.org/10.52214/cice.v1i1.11306>.
- Tarar, M. G., & Pulla, V. 2014. "Patriarchy, Gender Violence and Poverty amongst Pakistani Women: A Social Work Inquiry". *International Journal of Work and Human Services Practice*, 56-63.
- Walters, Rosie. 2016. "'Shot Pakistani girl': The limitations of girls education discourses in UK newspaper coverage of Malala Yousafzai." *The British Journal of Politics and International Relations* 18:(3):650-670.
- Weiss A.M. 2003. "Interpreting Islam and women's rights: Implementing CEDAW in Pakistan." *International Sociology* 18 No 3:581.
- Wilson Palais. 2016. "Plenary Session on the Government of Pakistan's Compliance with the Convention on the Rights of the Women Child". *Human Rights Watch Submission*, 52 (1) pp 12-66
- Zeeshan Malik. (2021). *The level of Girls Education in Rural Areas of Pakistan Subject to Socio-Economic, Demographic and Schooling Characteristics: Count Data Models Approach*. Pakistan Institute of Development Economics. Vol 20 (5): pp. 7451-7465. DOI:10.17051/ilkonline.2021.05.845

Situs Jaringan

- Asian Human Rights Commission (2014). "Malala Yousafzai: Epitome of fight against religious oppression of women". Statement issued by the Asian Human Rights Commission. <http://www.humanrights.asia/wp-content/uploads/2019/03/Malala-Yousafzai.pdf>
- Annelies Martens. 2013. "I Am Here To Speak For The Right Of Education For Every Child". Political Speech Analysis at the UN Youth Assembly. Accessed https://www.academia.edu/15105234/I_Am_Here_To_Speak_For_The_Right_Of_Education_For_Every_Child_The_Use_Of_Strategic_Functions_In_Malala_Yousafzai_s_Speech_At_The_UN_Youth_Assembly
- East Asia Forum. 2018. "Purdah disempowers Pakistan's women and weakens its economy." East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2018/08/30/purdah-disempowers-pakistans-women-and-weakens-its-economy/>.
- Gordon Brown 2015. Education for Girls All Over The World is The Civil Rights Struggle of Our Time. Diakses pada 7 April 2023, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/06/education-girls-world-civil-rights-malala>
- Government of Pakistan Statistics Division, Pakistan Bureau of Statistics 2015. *Labour Force Survey 2013-14 Annual Report*. Available <https://www.pbs.gov.pk/publication/labour-force-survey-2013-14-annual-report>
- Government of Pakistan Statistics Division, Pakistan Bureau of Statistics 2015. *Labour Force Survey 2014-15 Annual Report*. Available <https://www.pbs.gov.pk/publication/labour-force-survey-2014-15-annual-report>
- Human Rights Watch. 2018. "Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?" Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2018/11/13/shall-i-feed-my-daughter-or-educate-her/barriers-girls-education-pakistan>.
- Iswara, Aditya J. 2020. "Malala Yousafzai, Pejuang Hak Perempuan Halaman all." Kompas.com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/09/195546470/ku-tipan-tokoh-dunia-malala-yousafzai-pejuang-hak-perempuan?page=all>.
- Jon Boone 2014. "Men Involved in Malala Yousafzai Shooting arrested in Pakistan" *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/12/men-malala-yousafzai-shooting-arrested-pakistan>
- Kamal, Muhammad A., and Abdul W. Khan. 2022. "Gender inequality in education." Pakistan Today. <https://www.pakistantoday.com.pk/2022/02/27/gender-inequality-in-education/>.
- Khalid Malik (2014). *Human Development Report 2014*. United Nations Development Programme (UNDP)

- <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/gy/2014-Human-Development-Report---English.pdf>
- Leah Rodriguez. 2021. Malala Reflects on Visiting Nigeria in the Aftermath of #BringBackOurGirls. *Global Citizen*. Accessed <https://www.globalcitizen.org/en/content/malala-nigeria-girls-education-abductions/>
- Mahr, Krista. 2012. "Pakistan: Girl Activist Malala Yousafzai Shot by Taliban Gunmen." *World*. <https://world.time.com/2012/10/09/malala-yousafzai-the-latest-victim-in-pakistans-war-on-children/>.
- Marilisaracco. 2017. ONE Campaign launches #GirlsCount to shed light on girls' education crisis. *Global News*. Accessed <https://globalnews.ca/news/3294048/one-campaign-launches-girlscount-to-shed-light-on-girls-education-crisis/>
- Pakistan Education Statistics. 2015. "Pakistan Education Statistics." AEPAM Library. <http://library.aepam.edu.pk/Books/Pakistan%20Education%20Statistics%202013-14.pdf>.
- Pakistan Education Statistics. 2013-14. "Pakistan Education Statistics." AEPAM Library. <http://library.aepam.edu.pk/Books/Pakistan%20Education%20Statistics%202013-14.pdf>
- PAKISTAN SOCIAL AND LIVING STANDARDS MEASUREMENT SURVEY (2014-15). Government of Pakistan Statistics Division Pakistan Bureau of Statistics Islamabad. <https://phkh.nhsrsrc.pk/sites/default/files/2020-12/Pakistan%20Social%20Living%20Standards%20Measurement%20Survey%202014-15.pdf>
- Philippa Lei dan Taylor Royle (2020). Malala Fund Strategic Plan 2020-2025. https://assets.ctfassets.net/0oan5gk9rgbh/YEbHYrMmdrxXIZZ9bOxwc/2e442094078ba4b3c092596ba119977b/MF_StrategicPlan_WEB.pdf
- Selim Jahan (2016). *Human Development Reports 2016*. United Nations Development United Nations Development Programme (UNDP). <https://hdr.undp.org/system/files/documents/2016humandevlopmentreportpdf1.pdf.pdf>
- Selim Jahan (2015). *Human Development Reports 2015*. United Nations Development United Nations Development Programme (UNDP). https://hdr.undp.org/system/files/documents/2015humandevlopmentreportpdf_1.pdf
- UN Women (2013). *Annual Report UN Women 2012-13*. United Nations, New York <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/6/UNwomen-AnnualReport2012-2013en%20pdf.pdf>

- UN Women (2015). Young Women In Peace and Security. United Nations Women <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/young-women-in-peace-and-security>
- UNESCO. (2014). New global education goals must prioritize girls .New York: UNESCO.<https://www.unesco.org/en/articles/new-global-education-goals-must-prioritize-girls>
- UNESCO (2014). Framework Agreement between UNESCO and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on the Malala Funds-in-Trust for Girls’ Right to Education. Islamabad. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000258978> <http://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/malala-fund>
- UNESDOC. (2017). Evaluation of UNESCO’s Programme Interventions on Girl’s And Women Education. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000258978>
- UNESCO. (2018). Girls’ Right to Education Programme in Pakistan. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265885/PDF/265885eng.pdf>.
- UNESCO (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for itable quality education and promote lifelong learning opportunities for all <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>
- UNICEF. (2013). Pakistan One United Nations Programme 2013 - 2017. New York: UNICEF.https://www.unicef.org/executiveboard/media/791/file/2013-7-Rev1-Board_report-EN-ODS.pdf
- Verma Jagruti. 2020. “Malala Fund: NGO branding with faces, illustrations & digital assets”. *Social Samosa*. <https://www.socialsamosa.com/2020/07/tracing-malala-fund-social-media-strategy/>
- Zuberi M.A 2013. Angelina Jolie Donates \$200.000 to Malala Fund. Business Recorder. <https://www.brecorder.com/news/4079446/angelina-jolie-donates-200000-to-malala-fund-201304061171350>